

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT PENGELUARAN 2017-2021



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT PENGELUARAN

2017-2021



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT PENGELUARAN 2017 - 2021**

ISSN : 2655-075X
Nomor Publikasi : 33000.2214
Katalog : 9302020.33

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 86 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :
CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT PENGELUARAN 2017 - 2021**

Anggota Tim Penyusun :

Pengarah : Ir. Adhi Wiriana, M.Si

Penanggung Jawab : Didik Nursetyohadi, M.Agb.

Penyunting : Didik Nursetyohadi, M.Agb.
Dra. Eny Pramudyastuti

Penulis : Diana Dwi Susanti, SST

Pengolah Data : Diana Dwi Susanti, SST

Retabulasi : Joko Mulyono

Penyusun : Diana Dwi Susanti, SST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Disamping itu, data ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Dalam publikasi ini ditampilkan PDRB yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Melalui pendekatan ini, PDRB dirinci menurut komponen pengeluaran yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan Ekspor Impor. Disamping menampilkan angka PDRB Jawa Tengah menurut Pengeluaran, publikasi ini juga mengulas sedikit kondisi ekonomi global dan nasional terutama yang terkait dengan PDRB Pengeluaran.

Publikasi ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak untuk kepentingan pengembangan ekonomi Jawa Tengah khususnya, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat.

Semarang, April 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI JAWA TENGAH,


Ir. Adhi Wiriana, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	3
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	3
1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB	5
2. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)	9
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)	12
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)	15
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	17
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)	21
2.6 EKSPOR - IMPOR	25
3. PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN INDONESIA	29
3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA	29
3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA	32
4. PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TENGAH	39
4.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB JAWA TENGAH MENURUT PENGELUARAN	39
4.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	41
4.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	44
4.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	45

4.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	48
4.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI	50
4.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI	51
4.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI	53
4.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH	55
5. PENUTUP	61
LAMPIRAN	65
DAFTAR PUSTAKA	85

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	42
Tabel 4.2.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Menurut Kelompok Konsumsi, Tahun 2017 - 2021 (persen)	43
Tabel 4.3.	Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga ADHK 2010 Menurut Kelompok Konsumsi, Tahun 2017 - 2021 (persen)	44
Tabel 4.4.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Tahun 2017 - 2021	45
Tabel 4.5.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2017 - 2021	46
Tabel 4.6.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Tahun 2017 - 2021	47
Tabel 4.7.	Perkembangan dan Struktur PMTB, Tahun 2017 - 2021	49
Tabel 4.8.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, Tahun 2017 - 2021	51
Tabel 4.9.	Perkembangan dan Struktur Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri, Tahun 2017 - 2021	53
Tabel 4.10.	Perkembangan dan Struktur Impor Barang dan Jasa Luar Negeri, Tahun 2017 - 2021	54
Tabel 4.11.	Net Ekspor Antar Daerah, Tahun 2017 - 2021	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara 2018 - 2021 (persen)	30
Grafik 3.2. PDB Per Kapita Indonesia, 2017 - 2021 (juta rupiah)	33
Grafik 3.3. Komponen Pengeluaran PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2017 - 2021 (persen)	33
Grafik 3.4. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Komponen Utama 2017 - 2021 (persen)	34
Grafik 3.5. Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PDB Pengeluaran Nasional 2021 (persen)	35
Grafik 4.1. Perubahan Struktur Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2017 ke 2021 (persen)	40
Grafik 4.2. Rata-rata Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran, Periode 2017 - 2021 (persen)	41

DAFTAR LAMPIRAN

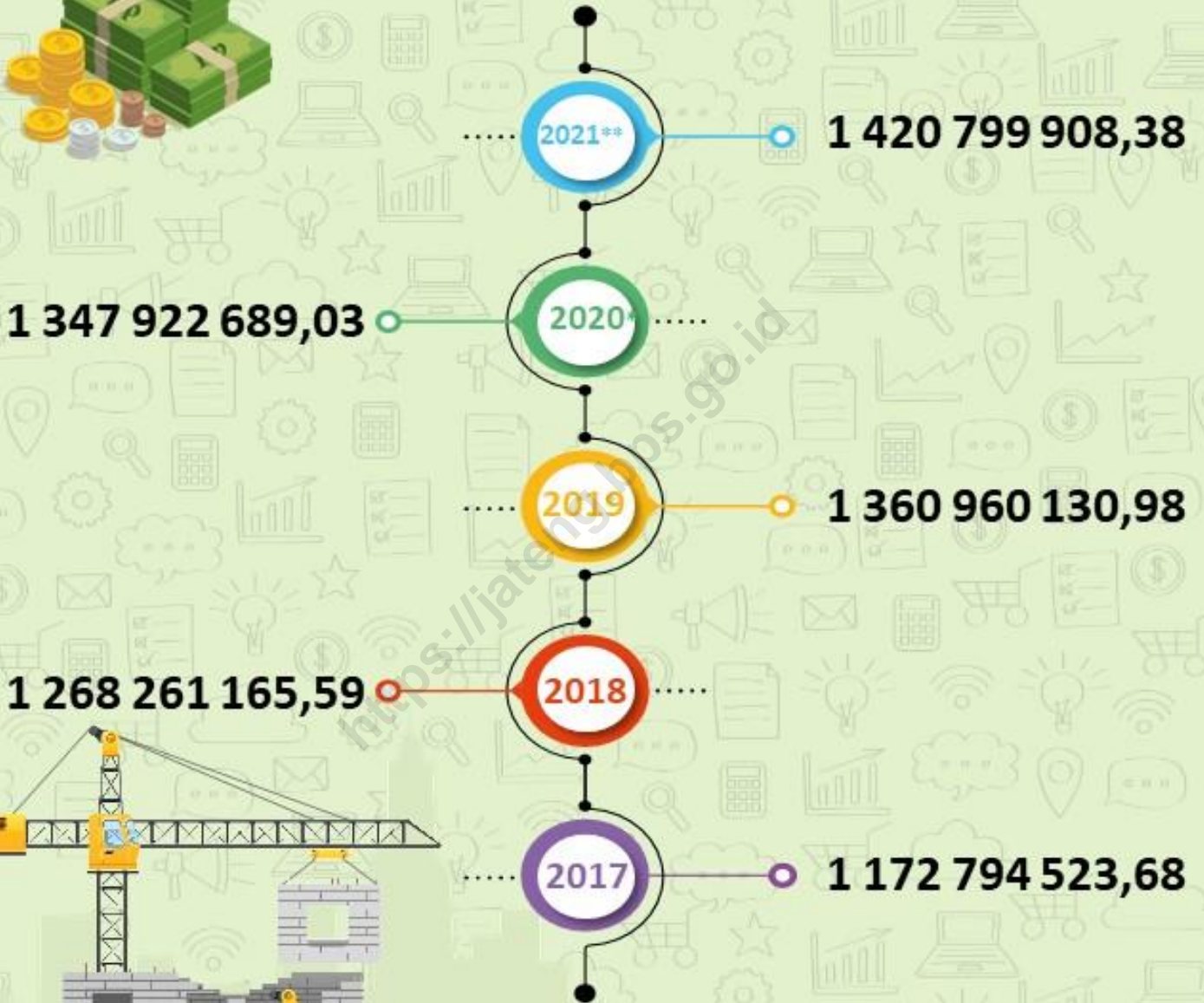
Lampiran 1.	Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara di Dunia 2017 – 2021 (Miliar Rp) ...	65
Lampiran 2.	Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (Miliar Rp)	66
Lampiran 3.	Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (Miliar Rp).....	67
Lampiran 4.	Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Adh Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (persen).....	68
Lampiran 5.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHK 2010 Menurut Komponen Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (persen)	69
Lampiran 6.	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (Juta Rupiah).....	70
Lampiran 7.	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (Juta Rupiah).....	71
Lampiran 8.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (persen)...	72
Lampiran 9.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Tahun 2017 – 2021 (persen)	73
Lampiran 10.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (persen)	74
Lampiran 11.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) Jawa Tengah menurut Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021	75
Lampiran 12.	Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah menurut Pengeluaran, Tahun 2017 – 2021 (persen).....	76
Lampiran 13.	Andil Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah menurut Pengeluaran, Tahun 2017 – 2021 (persen).....	77
Lampiran 14.	Nilai Ekspor Nonmigas Jawa Tengah Menurut Golongan Barang (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), Tahun 2019 - 2021.....	78

Lampiran 15.	Nilai Ekspor Migas Jawa Tengah (juta U\$\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), Tahun 2019 - 2021.....	79
Lampiran 16.	Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Sektor (juta U\$\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), Tahun Tahun 2019 - 2021	80
Lampiran 17.	Nilai Impor Nonmigas Jawa Tengah Menurut Golongan Barang (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), Tahun 2019 - 2021	81
Lampiran 18.	Nilai Impor Migas Jawa Tengah (juta U\$\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), Tahun 2019 - 2021	82
Lampiran 19.	Nilai Impor Jawa Tengah Menurut Golongan Penggunaan Barang (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen), Tahun 2019 - 2021	83

<https://jateng.bps.go.id>

PDRB ADHB MENURUT PENGELUARAN

PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017 - 2021 (JUTA RUPIAH)



Keterangan * : angka sementara
** : angka sangat sementara

01

Pendahuluan

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan

Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/*region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/*region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

PDRB ADHK MENURUT PENGELUARAN

PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017 - 2021 (JUTA RUPIAH)



997 317 097,26

2021**

991 516 543,31

2019

2020*

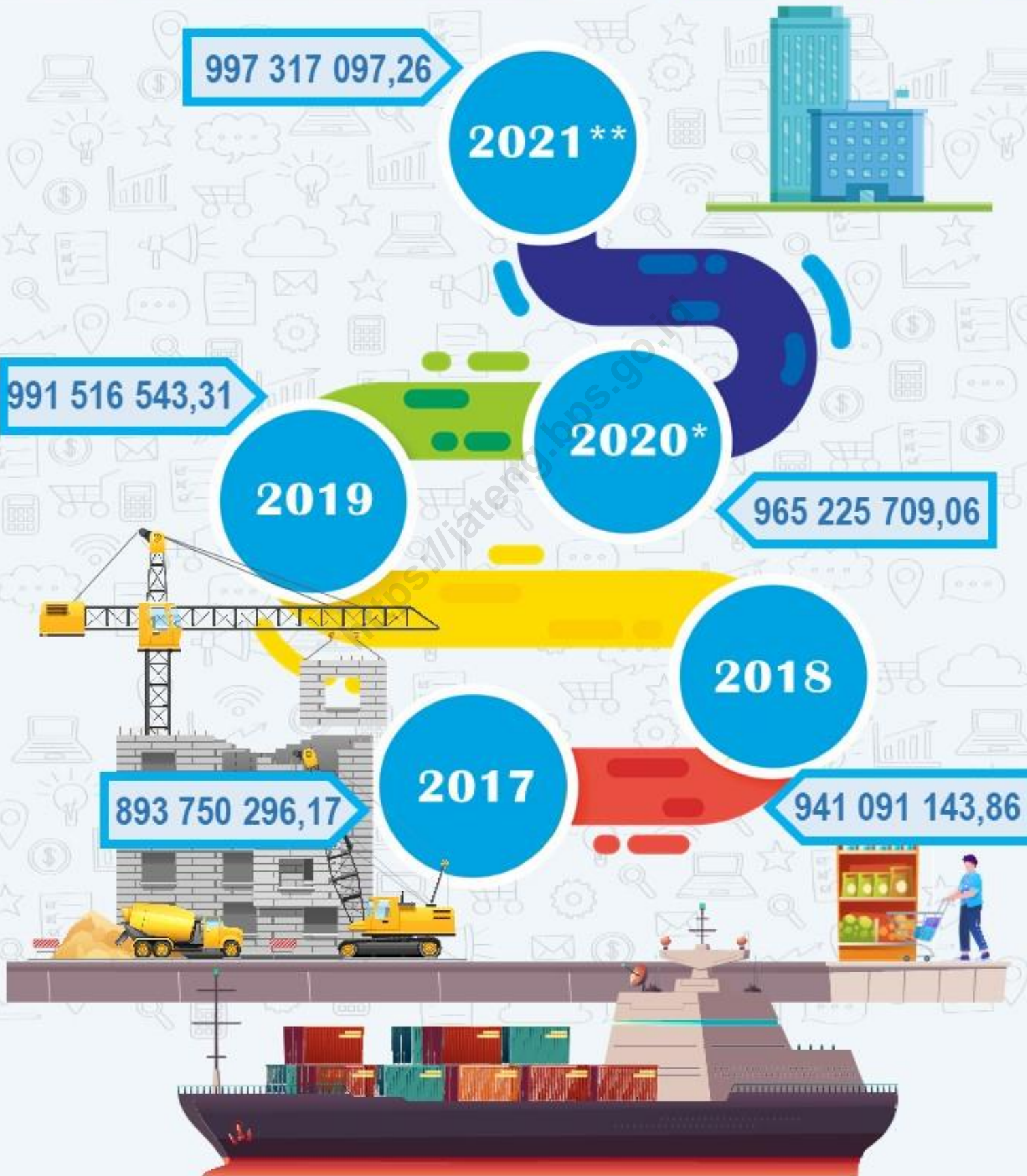
965 225 709,06

2018

893 750 296,17

2017

941 091 143,86



Keterangan * : angka sementara
** : angka sangat sementara

02

Metode Estimasi dan Sumber Data

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi

9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT *adh Berlaku*. PKRT *adh Konstan* 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKRT *adh Berlaku* dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah disesuaikan;
5. Menyusun Indeks Harga Implisit berdasarkan IHK Provinsi dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya

hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;

- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/ olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT adh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan

yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk tingkat Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga.
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.

- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di *deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB

dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan*.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai *adh Konstan* adalah dengan *men-deflate* PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikasikan PMTB *adh Konstan* dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB *adh Konstan* terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB *adh Berlaku*, nilai PMTB *adh Konstan* tersebut di *reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB *adh Konstan* di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB *adh Berlaku* diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB *adh Konstan* adalah dengan cara *mendeflate* PMTB *adh Berlaku* dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB *adh Berlaku* untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan *adh Berlaku* dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB *adh Konstan*nya diperoleh dengan *men-deflate* nilai *adh Berlaku* dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu :

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;

- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca

akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR IMPOR

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia

- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Import barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-import jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-import tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

PERTUMBUHAN EKONOMI

PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017 - 2021 (PERSEN)



<https://jateng.bps.go.id>

3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA

Setelah ekonomi dunia mengalami kontraksi pada tahun 2020 hingga -4,3 persen, tahun 2021 ekonomi global mulai bangkit. Aktivitas ekonomi mulai menggeliat dan tercatat tumbuh sebesar 5,5 persen (sumber : *Global Economic Prospects*). Walaupun pada tahun 2021 penyebaran Covid-19 varian Delta yang jauh lebih cepat menjadi penyebab negara-negara kembali menerapkan *lockdown* dan menutup pintu penerbangan internasional. Namun dunia sudah belajar dari pengalaman 2020, sehingga ekonomi tetap berjalan karena ada pelanggaran aktivitas di dalam wilayah domestik. Selain itu program vaksin meningkatkan kepercayaan untuk tetap beraktivitas meskipun virus Covid-19 semakin meningkat.

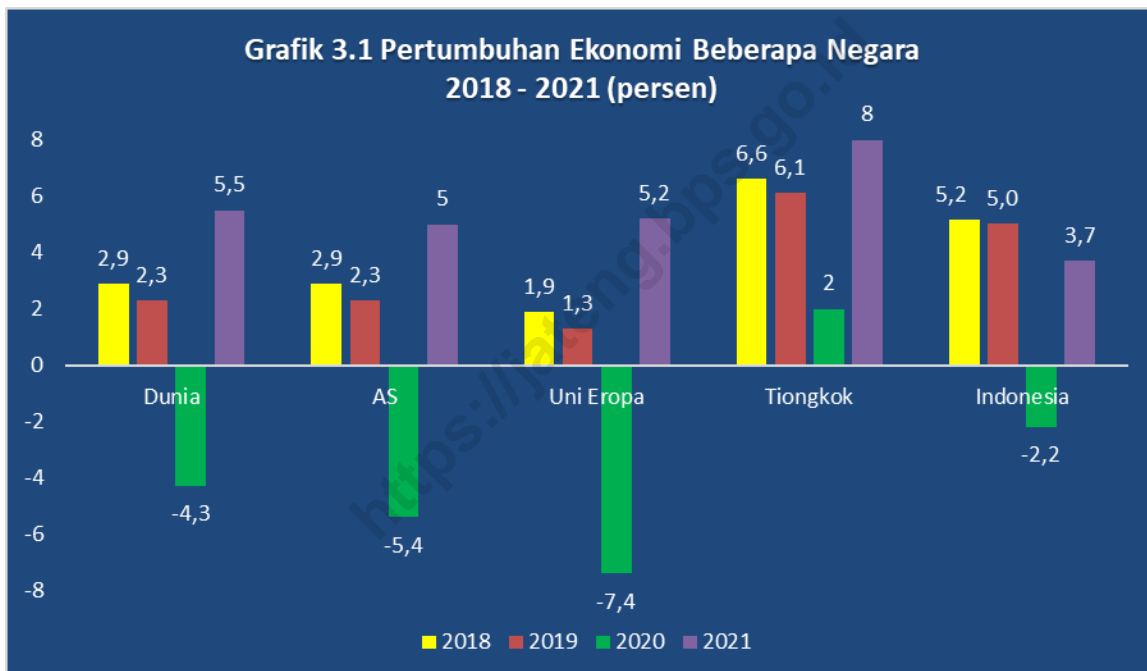
Pemulihan global pada tahun 2021 sebagian besar didorong oleh belanja konsumen yang meningkat dan penyerapan investasi. Pandemi Covid-19 yang telah memberi dampak negatif pada hampir semua sektor mengalami penurunan pada tahun 2020, masih menyisakan trauma terutama pada sektor pariwisata.

Rebound pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar mendapatkan pengaruh positif dari peluncuran program vaksinasi Covid-19. Harapan keberhasilan Program vaksin mempengaruhi sentimen bisnis (peningkatan optimisme) dan mendorong pengeluaran konsumsi. Namun percepatan pemulihan ekonomi dunia tidak terjadi secara merata. Gelombang pandemi Covid-19 muncul kembali pada triwulan III-2021 terutama terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 di negara berkembang. Pemulihan ekonomi di negara berkembang lebih lambat dibanding negara maju. Hal ini disebabkan oleh tingkat vaksinasi yang lebih rendah, kebijakan fiskal yang terbatas, serta terjadi penurunan pendapatan dan investasi akibat pandemi yang berlanjut.

Di sisi lain, kenaikan kasus Covid-19 akibat penyebaran varian virus baru dan hambatan pada rantai pasokan menjadi hambatan aktivitas ekonomi global. Hambatan

pada rantai pasokan global di tengah kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga komoditas internasional sehingga inflasi meningkat.

Negara-negara besar di dunia tidak terlepas dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Seperti Amerika Serikat yang mengalami kontraksi hingga -5,4 persen kemudian tumbuh 5 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Uni Eropa tumbuh lebih tinggi sebesar 5,2 persen dibandingkan Amerika Serikat. Sedangkan Tiongkok tumbuh melesit ekonominya dengan pertumbuhan 8 persen. Tiongkok ini pada masa pandemi dimana ekonomi global terkontraksi -4,3 persen, dan negara lainnya juga mengalami keterpurukan pertumbuhan ekonomi hingga kontraksi, namun Tiongkok tetap tumbuh positif 2 persen, walaupun kondisi ini melambat dibandingkan tahun 2018 maupun 2019 yang tumbuh sebesar 6 persen (lihat gambar 3.1).



Sumber : Bureau of Economic Analysis, Global Economic Prospect, World Economic Outlook, Eurostat News Release, Reuters.

Amerika Serikat (AS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun 2021. Ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi sejak 1984 dengan pertumbuhan 7,2 persen pada masa Presiden Ronald Reagan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas konsumen, ekspor, dan pengeluaran investasi sektor swasta.

Menurut Beth Ann Bovino, kepala ekonomi Standard & Poor's Global Ratings, ekonomi Amerika Serikat belajar beradaptasi dengan varian baru dan terus berproduksi. Merebaknya Covid-19 pada bulan Maret 2020 membuat pihak berwenang memerintahkan *lockdown*, di mana dunia usaha tiba-tiba tutup atau mengurangi jam kerja. Pengusaha secara

mengejutkan memangkas 22 juta pekerja. Ekonomi AS pun tenggelam ke dalam resesi yang dalam tahun 2020. Tetapi tingkat suku bunga yang sangat rendah, suntikan bantuan pemerintah yang besar, termasuk cek USD 1.400 untuk sebagian besar rumah tangga, dan peluncuran vaksin yang meluas berhasil menghidupkan kembali perekonomian AS tahun 2021. Banyak konsumen kembali kepercayaan diri dan sarana keuangan untuk keluar dan berbelanja lagi.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia, situasi pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa juga mulai tumbuh mencapai 5,2 persen tahun 2021, di mana laju ekonomi Perancis dan Italia melonjak ke depan. Pemulihan ekonomi Uni Eropa didukung oleh peluncuran vaksin virus corona serta dorongan ekonomi yang berasal dari dana pemulihan ekonomi Uni Eropa.

Jerman sebagai salah satu kekuatan ekonomi Uni Eropa hanya tumbuh 2,7 persen sepanjang tahun 2021. Jerman sebagai negara di Eropa yang tertinggal dalam pemulihan dari guncangan ekonomi akibat pandemi. Kinerja ekonomi belum mencapai tingkat sebelum krisis lagi menurut Kepala Badan Statistik Federal Georgh Thiel yang dirilis AFP.

Pandemi yang berdampak kuat pada kondisi ekonomi Uni Eropa tahun 2020, menyebabkan sekitar satu juta orang kehilangan pekerjaan pada dua minggu pertama pandemi Covid-19 di Eropa sesuai data yang dipaparkan *European Trade Union Confederation* (ETUC). Kasus positif virus Covid-19 di sejumlah negara anggota melonjak, seperti di Jerman, Perancis, Spanyol, dan Italia. Jerman sebagai ekonomi terbesar di Uni Eropa pertumbuhan ekonomi minus 5 persen. Untuk pemulihan ekonomi di kawasan Uni Eropa, sebagian besar pembatasan Covid-19 selama musim panas dicabut. Program vaksinasi digalakkan untuk menekan risiko infeksi.

Berbeda dengan Tiongkok, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 tumbuh positif 2 persen disaat hampir semua negara di dunia tumbuh negatif. Kota Wuhan, Tiongkok yang diyakini merupakan tempat awal penyebaran Covid-19 telah kembali normal. Setahun lalu, Kota ini mengalami *lockdown*, menyusul kota lainnya di Cina. Ekonomi Tiongkok menjadi yang pertama berkontraksi akibat pandemi.

Namun Tiongkok pulih dengan cepat. Kasus Covid-19 di Tiongkok terkendali sejak April (Woldometers, 2020). Ekonomi Tiongkok juga menjadi yang pertama kali pulih. Pertumbuhan ekonomi negara ini hanya berkontraksi pada kuartal pertama sebesar -6,8 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi pertama kalinya di Tiongkok sejak periode Revolusi Kultural pada 1976. Tiongkok adalah negara yang tidak mengalami resesi,

karena pada kuartal kedua ekonomi sudah bangkit dan mampu tumbuh 3,2 persen dan berturut-turut tumbuh 4,9 persen dan 6,5 persen pada kuartal empat. Permintaan masker medis dan berbagai peralatan kesehatan dari seluruh pasar internasional terhadap Tiongkok meningkat pesat.

Walaupun pertumbuhan ekonomi secara tahunan mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,1 persen, namun Tiongkok adalah negara besar yang mampu menahan gejolak ekonomi dunia tidak negatif lebih dalam. Pemulihan ekonomi tersebut didukung oleh penyebaran Covid-19 yang berhasil dikendalikan serta pemberian stimulus fiskal dan moneter untuk meningkatkan investasi.

Tahun 2021 Tiongkok mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sepanjang tahun 2021 dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Ekonomi Tiongkok melanjutkan pemulihan yang stabil dan memimpin dunia dalam pembangunan ekonomi dan pengendalian epidemi (NBS). Angka perdagangan Tiongkok menunjukkan ekspor dan impor naik. Aktivitas manufaktur mulai bangkit. Ekspor Tiongkok mendapatkan pangsa pasar besar-besaran ketika banyak negara menerapkan *lockdown* (Biro Statistik Nasional China, 2020). Tiongkok melonggarkan tindakan penguncian relatif lebih awal dari negara lain.

Kehadiran vaksin Covid-19 membawa harapan bagi pemulihan ekonomi global. Beberapa lembaga melihat ada sejumlah risiko bagi perekonomian global. Pertama, adanya gelombang kedua pandemi Covid-19. Kedua, tensi perang dagang, teknologi dan aliran dana yang berpotensi meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketiga, pandemi dapat memperlebar jurang ketimpangan sehingga dapat memicu konflik sosial. Keempat, dampak negatif pelanggaran kebijakan usai pandemi Covid-19 seperti banyak UMKM yang berpotensi bangkrut, risiko kredit dan stabilitas finansial memburuk dan risiko utang yang meningkat.

3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

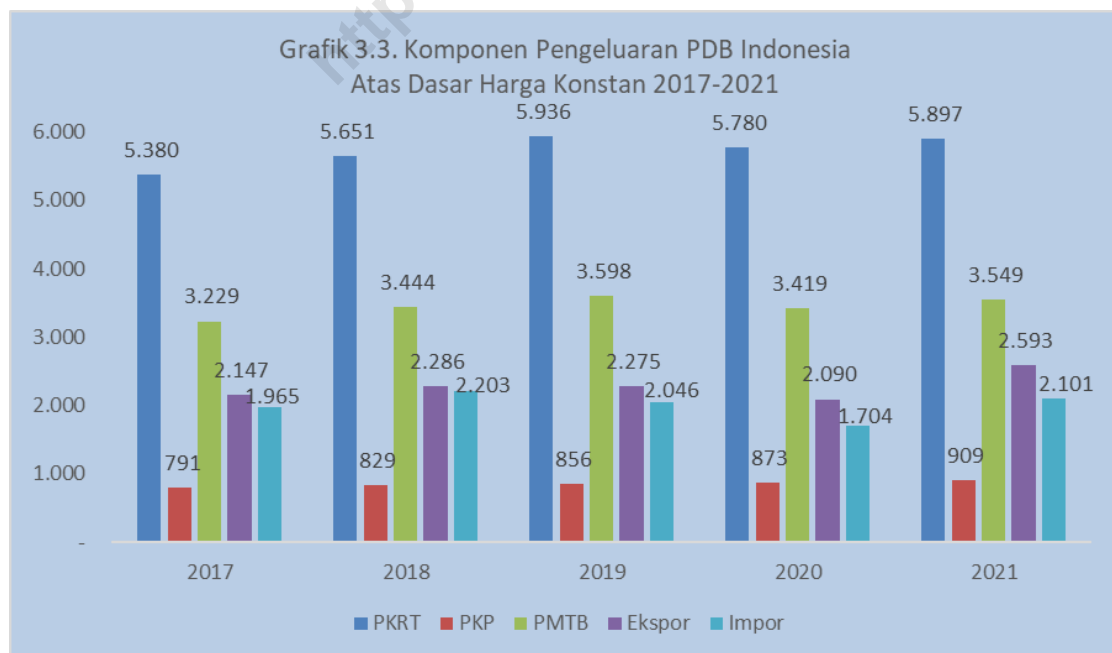
Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,7 persen. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi. Hal ini perlu dicatat, mengingat masih banyak perekonomian yang belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi seperti Filipina, Mexico, Jerman, Perancis, dan Italia. Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga tingkat PDRB per kapita Indonesia berhasil naik dari 57 juta

rupiah di tahun 2020 ke 62 juta rupiah di tahun 2021 atau naik 8,6 persen. Dengan pencapaian ini dan klasifikasi Bank Dunia terakhir (2020), Indonesia diperkirakan akan kembali masuk ke kelompok *Upper-Middle Income Countries* pada tahun 2021.



Sumber : BPS 2021 (diolah dari PDB Indonesia dan Proyeksi Penduduk Hasil SUPAS 2015)

Laju pertumbuhan ekonomi 2021 ditopang oleh pertumbuhan positif seluruh komponen utama pengeluaran. Keberhasilan pengendalian pandemi pasca penyebaran varian Delta tahun 2021 mampu mendorong keyakinan masyarakat untuk beraktivitas dan dunia usaha untuk berekspansi.

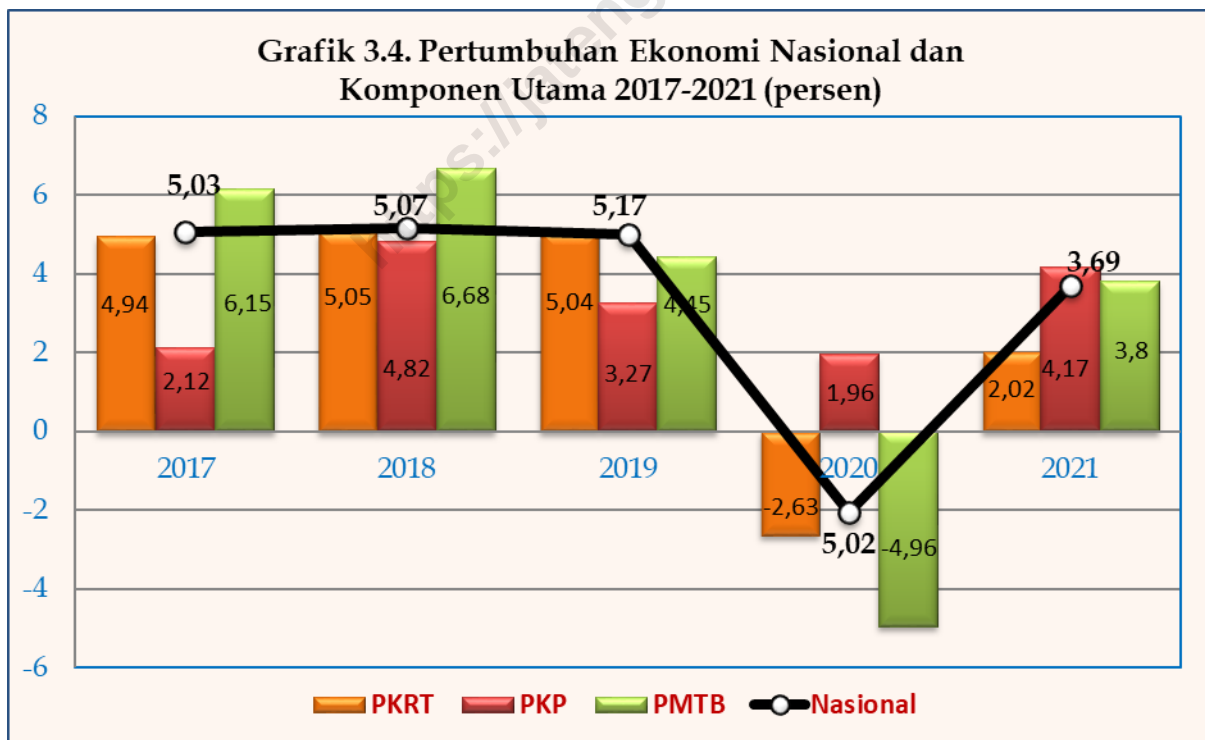


Sumber : BPS 2021

Aktivitas ekspor mampu melanjutkan pertumbuhan tinggi seiring permintaan dan harga komoditas global yang meningkat. Sementara impor juga meningkat. Meskipun komponen utama PKRT dan PMTB masih belum berada pada kondisi normal prapandemi, namun ekspor dan impor Indonesia mampu melebihi kondisi sebelum terjadi pandemi. Hal ini mencerminkan menguatnya pemulihan permintaan domestik, khususnya sektor produksi. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor unggulan nasional seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan transportasi melanjutkan tren pemulihan dengan mencatat pertumbuhan kuat.

APBN yang fleksibel dan responsif selama pandemi mampu menjaga keberlanjutan laju pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang sangat dinamis sepanjang 2021, khususnya terkait munculnya gelombang varian Delta, mampu direspon oleh Pemerintah melalui kebijakan *refocusing* APBN 2021.

Perluasan dan perpanjangan program perlindungan sosial serta dukungan sektor usaha dapat menjaga kinerja ekonomi tumbuh positif. Realisasi sementara Program PEN 2021 sebesar 658,9 T rupiah atau meningkat 13,65 persen dibandingkan realisasi Program PEN 2020 dengan besaran 579,78 T rupiah.

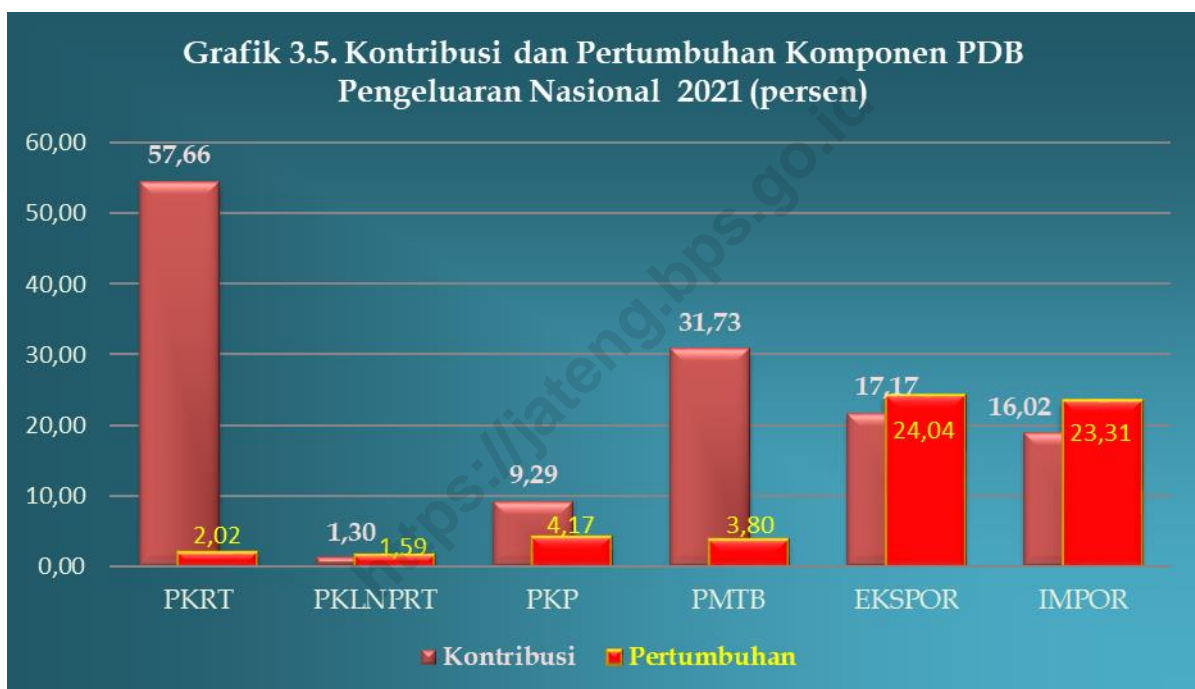


Sumber : BPS 2021

Penyebaran varian Delta yang berhasil dikendalikan dengan cepat dan efektif mampu mendorong aktivitas Konsumsi Rumah Tangga tumbuh progresif sebesar 2,02 persen setelah berkontraksi -2,63 persen di 2020 (grafik 3.4). Pelonggaran kebijakan PPKM

menjadi berskala mikro yang tertuang dalam regulasi Nomor 3 Tahun 2021, dimana pulau Jawa dan Bali masuk daftar PPKM Mikro menjadi pemicu meningkatnya aktivitas pergerakan masyarakat di luar rumah. Dengan ketersediaan vaksin, secara tidak langsung membuat masyarakat lebih leluasa berkegiatan di luar rumah serta mendorong pergerakan masyarakat untuk pulih lebih cepat.

Sementara itu, aktivitas investasi (PMTB) yang sempat tertahan, juga kembali meningkat 3,80 persen pada 2021. Konsumsi Pemerintah juga mampu tumbuh 4,17 persen secara keseluruhan tahun 2021 sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, serta pelaksanaan layanan publik pemerintah (grafik 3.4).



Sumber : BPS 2020

Ekspor mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 24,04 persen sepanjang tahun 2021. Laju pemulihan ekonomi global menjadi faktor utama yang menjaga kinerja ekspor Indonesia, terutama bersumber dari ekspor nonmigas seperti olahan CPO, kendaraan bermotor dan mesin. Kinerja Impor juga tumbuh tinggi mencapai 23,31 persen, didominasi importasi barang modal dan bahan baku, mencerminkan peningkatan aktivitas produksi domestik pada periode selanjutnya (grafik 3.5).

LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 (PERSEN)



PENGELUARAN
KONSUMSI
RUMAH TANGGA

1,82

PENGELUARAN
KONSUMSI
LNPRT

1,25

PENGELUARAN
KONSUMSI
PEMERINTAH

0,83

LAJU PERTUMBUHAN PDRB
3,32



PEMBENTUKAN
MODAL TETAP
BRUTO

6,86

EKSPOR LUAR
NEGERI

29,14

IMPOR LUAR
NEGERI

31,29



04

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian global dan nasional, memasuki satu tahun setelah pandemi Covid-19, perekonomian Jawa Tengah kembali bangkit dan tumbuh. Perbaikan ekonomi ini didorong oleh implementasi vaksinasi dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa.

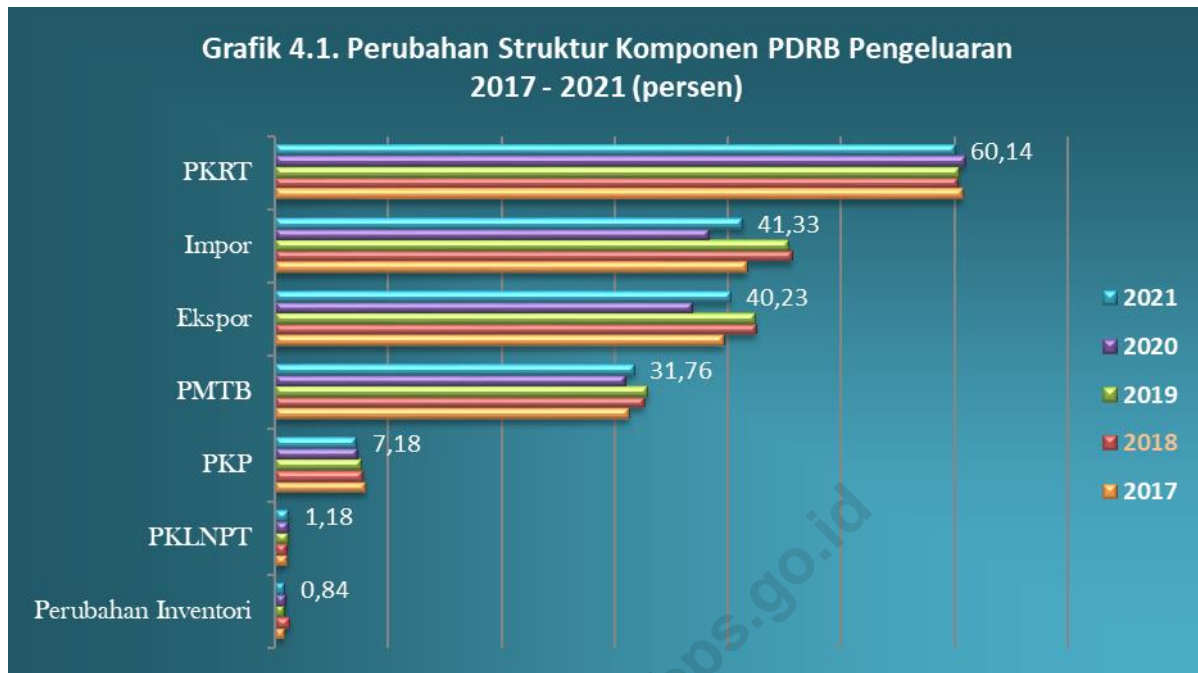
4.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB JAWA TENGAH MENURUT PENGELUARAN

Nilai ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 1.420,80 triliun rupiah. Angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan juga merupakan yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai ekonomi Jawa Tengah sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, PMTB, ekspor dan PKP. Keempat komponen utama pembentukan PDRB ini tumbuh positif, dan mempunyai nilai ekonomi melebihi prapandemi atau ekonomi pada tahun 2019.

Secara struktur ekonomi, peranan konsumsi rumah tangga masih yang paling besar. Kontribusinya mencapai 60 persen dalam membentuk ekonomi Jawa Tengah. Selain konsumsi rumah tangga, investasi atau PMTB juga menunjukkan peranan yang besar dengan kontribusi sebesar 30 persen keatas. Peranan ekspor di Jawa Tengah juga berada pada level 40 persen. Ini memberi gambaran bahwa pasar ekonomi Jawa Tengah semakin luas dan tidak hanya sekedar pasar lokal Jawa Tengah. Peningkatan pasar ini ditopang oleh investasi (PMTB) sebagai komponen penting bagi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan perekonomian terbesar ke-4 di Indonesia. Perekonomian Jawa Tengah berada di bawah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kinerja ekonomi Jawa Tengah selama ini ditopang oleh tiga komponen besar yaitu

konsumsi rumah tangga, ekspor dan PMTB. Kinerja ekspor dan PMTB mengalami peningkatan setelah tertahan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.



Catatan : Ekspor dan impor meliputi ekspor/impor antar provinsi dan antar negara.

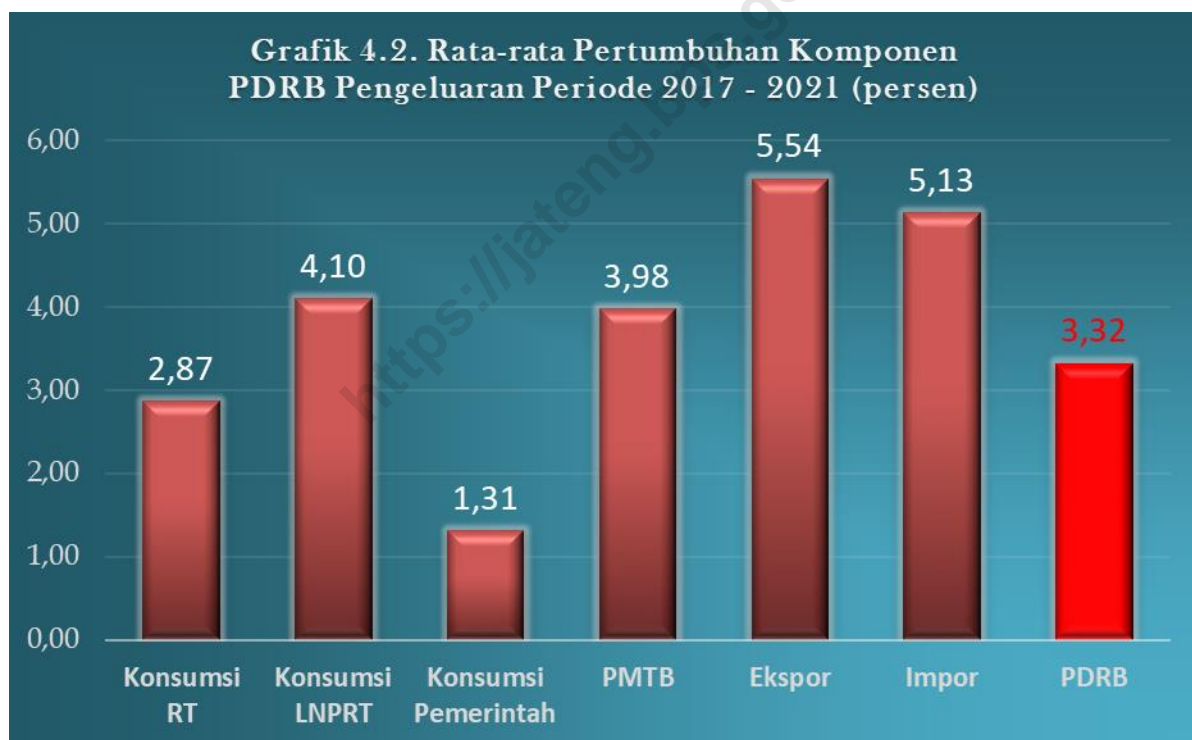
Meskipun demikian, dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi secara total, konsumsi rumah tangga masih penyumbang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 1,82 persen tahun 2021. Pada tahun 2021 komponen konsumsi rumah tangga memberikan andil ekonomi sebesar 1,08 persen terhadap total pertumbuhan yang terjadi pada tahun tersebut. Tahun sebelumnya andil komponen ini sebesar -0,83 persen terhadap total pertumbuhan.

Sementara itu komponen PMTB memberikan andil pertumbuhan 1,98 persen pada tahun 2021. Andil komponen ini merupakan andil terbesar setelah komponen ekspor. Tingginya investasi dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi pertanda bahwa ekonomi Jawa Tengah mulai bangkit kembali. Sementara itu, pada tahun 2021 komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mempunyai andil masing-masing sebesar 0,01 persen dan 0,05 persen terhadap pertumbuhan total. Andil komponen impor yang merupakan faktor pengurang tercatat 4,93 persen. Data andil pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode 2017-2021 dapat dilihat pada Lampiran 12.

4.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga merupakan komponen yang memiliki proporsi terbesar dalam PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran. Konsumsi ini dipenuhi dari produk domestik dan produk impor, baik impor dari luar negeri maupun provinsi lain. Dalam kurun waktu 2017-2021, nilai konsumsi rumah tangga mengalami penurunan akibat pandemi.

Share ekspor dan impor Jawa Tengah diatas 30 persen, menyebabkan ekonomi Jawa tengah sangat tergantung dari perdagangan tersebut. Bahan baku dan barang modal beberapa industri di Jawa Tengah tergantung dari peran ekspor dan impor. Pemulihan ekonomi 2021 mengembalikan perdagangan Jawa Tengah mendekati normal seperti pada masa sebelum pandemi.



Sumber : BPS Jawa Tengah (data diolah)

Sejumlah industri kembali menggeliat dengan berbagai permintaan dari dalam dan luar negeri. Bahan baku dan barang modal mulai meningkat seiring dengan peningkatan impor Jawa Tengah tahun 2021. Sinyal positif dari fenomena konsumsi rumah tangga yang tertahan pada masa pandemi kembali bergerak aktivitas belanja masyarakat.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama periode tahun 2017 hingga 2018 cenderung menurun. Pada tahun 2017 proporsinya mencapai 60,67 persen,

sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 60,30 persen. Penurunan proporsi ini dikarenakan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak secepat pertumbuhan komponen lainnya. Namun, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 60,99 persen dan kembali menurun tajam dibandingkan 5 tahun kebelakang dengan *share* sebesar 60,14 persen (Tabel 4.1). Penurunan proporsi ini disebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak sekencang komponen lainnya.

Tabel 4.1. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	711 586,51	764 808,38	821 948,12	822 095,50	854 472,69
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	531 583,77	556 540,86	582 253,35	573 976,75	584 447,30
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	60,67	60,30	60,39	60,99	60,14
Pertumbuhan ADHK (%)	4,62	4,69	4,62	-1,42	1,82

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara umum, konsumsi akhir rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh Jawa Tengah juga meningkat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan untuk membiayai konsumsi makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan, transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya, hotel dan restoran, serta lainnya semakin meningkat. Secara nilai semua jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga di atas meningkat akan tetapi pertumbuhannya berbeda-beda.

Di era sekarang, rumah tangga kelas menengah Indonesia menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya dari sisi jumlah yg terus meningkat akan tetapi perubahan gaya hidup mendorong konsumsi rumah tangga kelompok masyarakat ini terus meningkat. Didukung lagi dengan melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik, sehingga memicu meningkatnya konsumsi. Selain itu, konsumsi tersebut juga didorong oleh populasi kaum muda yang terus bertambah hingga meningkatkan penggunaan belanja

online. Ditambah lagi semakin marak *start-up* belanja online pada masa pandemi menjadi salah satu peningkatan konsumsi rumah tangga. Walaupun daya beli masyarakat masih tertahan yang disebabkan oleh pandemi hampir di semua wilayah di Jawa Tengah setidaknya bisa menjadi pendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.

Tabel 4.2. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga Menurut Kelompok Konsumsi 2017 - 2021 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	38,59	38,63	38,33	39,62	40,57
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,97	3,95	3,94	4,12	4,03
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,91	12,80	12,66	12,85	12,64
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,93	8,09	8,14	8,26	8,21
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	26,17	25,87	26,11	24,81	24,17
f. Hotel dan Restoran	8,39	8,62	8,82	8,23	8,28
g. Lainnya	2,03	2,04	2,00	2,13	2,11
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4.2 memperlihatkan sedikit pergeseran pola konsumsi masyarakat. Konsumsi makanan dan minuman masih merupakan kebutuhan konsumsi terbesar, dan peranannya semakin meningkat dari keseluruhan konsumsi rumah tangga karena penurunan konsumsi *leisure* seperti transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya, hotel dan restoran. Perubahan pola konsumsi masyarakat ini tidak lepas dari pengaruh pandemi yang membatasi pergerakan manusia. Bahkan pada bulan Maret – Mei 2020 diberlakukan PSBB, nyaris tidak ada aktivitas transportasi, dan penutupan berbagai tempat wisata dan hiburan untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Kemudian 2021, kebijakan menjadi PPKM Mikro dengan berbagai level sesuai dengan tingkat penularan Covid-19 yang di wilayah tersebut. Kebijakan ini cukup membawa dampak positif, karena masyarakat sudah mulai berani

beraktivitas di luar rumah. Adanya program vaksinasi juga menambah tingkat kepercayaan masyarakat untuk kembali bekerja secara normal.

Pertumbuhan konsumsi (riil) rumah tangga adhk juga dapat menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan kuantitas konsumsi rumah tangga. Informasi ini menggambarkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat terutama pada golongan menengah ke atas (Tabel 4.3). Pada tahun 2021, kelompok konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 1,82 persen. Pertumbuhan paling tinggi pada sub kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya. Pada saat pandemi, konsumsi *leisure* ini yang paling terdampak, namun ketika pemulihan ekonomi, konsumsi rumah tangga menengah ke atas mulai bangkit kembali dengan pengeluaran *leisure*-nya.

Tabel 4.3. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga ADHK 2010 Menurut Kelompok Konsumsi 2017 - 2021 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	3,47	3,40	3,60	1,31	1,84
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,31	5,20	5,17	1,03	0,23
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,66	4,66	3,61	0,55	0,79
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,68	5,87	4,99	3,53	0,19
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	5,33	4,96	5,34	-5,89	3,57
f. Hotel dan Restoran	7,92	7,82	7,36	-6,73	0,68
g. Lainnya	6,02	4,94	4,01	0,17	0,17
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4,62	4,69	4,62	-1,42	1,82

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen. Peranan institusi ini dalam perekonomian masih perlu mendapat perhatian sehingga ke depannya akan semakin meningkat. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Berdasarkan tabel 4.4, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada tahun 2021 tumbuh 1,25 persen, dibandingkan pertumbuhan tahun

sebelumnya berkontraksi -3,72 persen. Aktivitas lembaga keagamaan tahun 2021 mulai mengadakan terawih di masjid. Perayaan agama juga dilakukan di tempat-tempat ibadah. Ini yang mendukung pertumbuhan positif pada konsumsi LNPRT. Selain itu, organisasi kebudayaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi juga mulai menggeliat dan beraktivitas kembali walaupun belum seperti pada saat sebelum pandemi.

Tabel 4.4. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	13 168,41	14 491,86	16 443,22	16 064,61	16 784,70
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	8 875,11	9 551,01	10 592,51	10 198,08	10 326,06
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	1,12	1,14	1,21	1,19	1,18
Pertumbuhan ADHK (%)	4,43	7,62	10,90	-3,72	1,25

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Peningkatan konsumsi listrik kategori sosial tahun 2021 meningkat 6,14 persen mengindikasikan kegiatan sosial mulai berjalan kembali. Pelonggaran kegiatan masyarakat dengan penerapan PPKM berbasis mikro pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 pelaksanaan PSBB secara ketat.

4.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah terdiri dari konsumsi individu dan konsumsi kolektif. Secara nominal, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan perbaikan untuk *adh berlaku*, maupun *adh konstan 2010* pada tahun 2021. Tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adh berlaku* sebesar 94,26 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 103,21 triliun rupiah. Namun pada tahun 2020 terkoreksi 98,97 triliun rupiah kemudian meningkat kembali menjadi 101,98 triliun rupiah.

Belanja pemerintah terjadi peningkatan karena peningkatan anggaran program pemulihan ekonomi. Peran pemerintah dalam masa pandemi sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang terdampak, sehingga perekonomian tetap berjalan. Belanja

pemerintah menjadi sebuah alat yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam hal ini. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga semakin meningkat yang pada akhirnya mendorong ekonomi untuk tumbuh.

Tabel 4.5. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019*	2020**	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	94 261,56	98 717,17	103 209,52	98 965,67	101 975,11
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	59 554,14	61 161,38	63 630,74	61 030,72	61 538,71
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	8,04	7,78	7,58	7,34	7,18
Pertumbuhan (% ADHK)	3,07	2,70	4,04	-4,09	0,83

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah tidak mencapai 10 persen. Sebagian pengeluaran pemerintah dalam bentuk barang modal tercatat dalam komponen PMTB dan sebagian lagi yang dikeluarkan dalam bentuk dana bantuan kepada masyarakat akan tercatat dalam komponen PKRT. Jika digabungkan, maka peran pemerintah sebenarnya lebih dari 10 persen. Meskipun peranan konsumsi akhir pemerintah tidak terlalu besar, kebijakan pemerintah yang bersifat positif seperti penyediaan infrastruktur, kemudahan dan keterbukaan iklim berusaha, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan lain-lain akan memberikan dampak berantai yang positif terhadap perkembangan perekonomian secara umum.

Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara riil berfluktuasi. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2021, pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 4,04 persen, sedangkan pertumbuhan konsumsi pemerintah terendah

terjadi pada tahun 2020 yaitu -4,30 persen. Rendahnya konsumsi pemerintah terjadi akibat *shortfall* pajak yang melebar dan mempengaruhi realisasi belanja pemerintah.

Tabel 4.6. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir Pemerintah ADHB					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	47 239,88	49 458,38	52 386,52	49 920,99	50 421,31
(%)	50,12	50,10	50,76	50,44	49,44
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	47 021,68	49 258,79	50 823,00	49 044,69	51 553,80
(%)	49,88	49,90	49,24	49,96	50,56
Total Konsumsi (Miliar Rp)	94 261,56	98 717,17	103 209,52	98 965,67	101 975,11
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan (% ADHK 2010)					
a. Konsumsi Kolektif	4,08	2,53	5,28	-4,68	-1,54
b. Konsumsi Individu	2,09	2,87	2,83	-3,49	3,17
Total Konsumsi	3,07	2,70	4,04	-4,09	0,83
Pertumbuhan indeks implisit (%)					
a. Konsumsi Kolektif	5,40	2,12	0,61	-0,02	2,58
b. Konsumsi Individu	3,44	1,84	0,34	-0,01	1,89
Total Konsumsi	4,42	1,97	0,49	-0,03	2,19

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara struktur, pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan menjadi konsumsi kolektif dan konsumsi individu. Konsumsi kolektif menggambarkan konsumsi pemerintah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat seperti keamanan, perekonomian, kebijakan dan kehidupan beragama. Sedangkan konsumsi individu menggambarkan konsumsi pemerintah yang dinikmati oleh masyarakat tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Hanya penduduk yang bersekolah dan yang mengakses fasilitas kesehatan pemerintah yang

menikmatinya. Data pada Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa proporsi antara kedua jenis konsumsi ini di Jawa Tengah hampir berimbang. Secara nominal, kedua pengeluaran ini mengalami penurunan tahun 2020 dan kembali menguat pada tahun 2021, walaupun belum sama seperti sebelum pandemi .

Pertumbuhan konsumsi individu berfluktuasi, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 3,17 persen dan terendah tahun 2020 yaitu -2,81 persen. Demikian juga dengan pertumbuhan konsumsi kolektif berfluktuasi, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,28 persen, sedangkan pertumbuhan terendah -5,78 persen terjadi pada tahun 2020. Konsumsi akhir pemerintah merupakan pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial dari pemerintah.

4.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi dalam bentuk fisik. Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Investasi fisik berfungsi sebagai input tidak langsung di dalam proses produksi pada berbagai sektor lapangan usaha dan dapat digunakan secara berulang. Investasi fisik ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pertumbuhan PMTB berfluktuasi, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 7,68 persen dan terendah tahun 2020 sebesar -6,98 persen. PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam pembentukan modal tetap bruto. Rata-rata perbandingan antara kedua komponen ini adalah 85 persen untuk PMTB bangunan dan 15 persen untuk non-bangunan. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB.

Pertumbuhan PMTB bangunan lebih stabil setiap tahunnya. Selama 2017 - 2019, pertumbuhan PMTB bangunan berada pada kisaran 4 sampai 7 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017. Peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2017 tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur jalan, jembatan, sarana perhubungan,

energi dan sebagainya. Peningkatan infrastruktur dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta dapat meningkatkan daya saing di tengah persaingan global. Sedangkan tahun 2020 terjadi kontraksi -6,98 persen, disebabkan oleh dampak pandemi. Kontraksi terbesar terjadi pada investasi bangunan sebesar -5,83 persen, disebabkan banyak usaha yang mengalami kolaps untuk mempertahankan produksinya. Namun investasi di Jawa Tengah tahun 2021 menunjukkan geliatnya kembali dengan tumbuh sebesar 6,86 persen.

Tabel 4.7. Perkembangan dan Struktur PMTB 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	366 766,47	413 749,15	448 351,59	417 815,40	451 292,66
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	264 716,11	285 045,11	298 877,27	278 024,57	297 092,06
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	31,27	32,62	32,94	31,00	31,76
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Miliar Rp)	313 778,52	348 207,11	375 502,76	355 684,85	387 156,37
(%)	(85,55)	(84,16)	(83,75)	(85,13)	(85,79)
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	52 987,94	65 542,04	72 848,83	62 130,54	64 136,28
(%)	(14,45)	(15,84)	(16,25)	(14,87)	(14,21)
Total PMTB (Miliar Rp)	366 766,47	413 749,15	448 351,59	417 815,40	451 292,66
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	7,60	6,29	4,68	-5,83	7,33
b. Non Bangunan	6,88	16,46	5,84	-13,53	3,95
Total PMTB	7,50	7,68	4,85	-6,98	6,86

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan PMTB non-bangunan sangat fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 16,46 persen dan terendah pada tahun 2020 yang mengalami

kontraksi pertumbuhan sebesar -13,53 persen. Pembangunan beberapa PLTU di Jawa Tengah yang dimulai tahun 2017, mencapai puncak pemenuhan kebutuhan mesin-mesin di tahun 2018. Hal ini yang memicu pertumbuhan PMTB non bangunan tahun 2018 meningkat cukup tinggi. Tahun 2019 pembangunan PLTU sudah sampai pada tahap *finishing*, dan kebutuhan mesin-mesin PLTU sudah berkurang, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan di tahun 2019. Sebagian besar mesin-mesin PLTU tersebut diimpor dari luar negeri. Tahun 2020 terjadi kontraksi karena sejumlah usaha yang terimbas pandemi. Kemudian kembali tumbuh sebesar 3,95 persen pada tahun 2021.

Pemerintah Jawa Tengah terus berupaya untuk meningkatkan investasi baik investasi dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) melalui berbagai kebijakan, antara lain kemudahan dalam hal perizinan, promosi potensi Jawa Tengah dan menyediakan wilayah khusus kawasan industri baru di beberapa kabupaten/kota, seperti di Kabupaten Kendal untuk mendorong pertumbuhan Jawa Tengah 7 persen pada tahun 2023. Namun sejumlah proyek ini tidak semua berjalan dengan baik karena adanya pandemi pada tahun 2020. Tahun 2021 kembali menguat dengan pertumbuhan 6,86 persen, meskipun nilai ekonomi investasi belum mampu kembali seperti prapandemi atau nilai ekonomi tahun 2019.

4.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital) selama kurang waktu tertentu. Dalam PDRB tahunan, perubahan yang dimaksud adalah selisih persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Komponen perubahan inventori dapat memiliki hasil positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Hal utama yang dapat dilihat dari komponen perubahan inventori adalah proporsi. Dalam PDRB pada umumnya perubahan inventori mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif). Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 proporsinya

sebesar 0,83 persen, terendah dalam kurun waktu 2017 sampai 2021. Adapun yang tertinggi sebesar 1,36 persen terjadi pada tahun 2018 (Tabel 4.8). Perubahan inventori merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian inventori merupakan bagian dari investasi, sedangkan perubahan inventori terjadi karena adanya proses produksi maupun impor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan peningkatan berbagai komponen pendukungnya.

Tabel 4.8. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	10 618,21	17 201,59	11 362,20	12 797,37	11 936,47
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	7 952,83	8 323,39	7 389,97	13 797,41	9 475,50
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,91	1,36	0,83	0,95	0,84

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Nilai Ekonomi dari ekspor luar negeri Jawa Tengah dihitung atas dasar harga berlaku tahun 2021 tercatat 158,82 triliun rupiah. Angka ini merupakan tertinggi sepanjang tahun 2017-2021. Demikian juga dengan PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan mencapai 105,74 triliun rupiah. Ini merupakan sinyal positif dalam pemulihan ekonomi Jawa Tengah.

Komoditas utama ekspor Jawa Tengah ke luar negeri pada tahun 2021 adalah pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan serta kayu dan barang dari kayu. Pakaian jadi bukan rajutan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi paling besar pada total ekspor Jawa Tengah, yaitu sebesar 19,78 persen. Sementara itu, barang rajutan serta kayu dan barang dari kayu memberikan kontribusi masing-masing sebesar 11,88 persen dan 11,40 persen dari total ekspor Jawa Tengah. Komoditas yang mengalami peningkatan

ekspor paling tinggi adalah barang dari kulit samak sebesar 65,05 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi, ekspor mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Selain komoditi barang dari kulit samak yang mengalami pertumbuhan tinggi, komoditi alas kaki, barang dari bulu unggas, bunga artifisial dan wig, perabotan lampu dan alat penerangan serta kayu dan barang dari kayu tumbuh berkisar 40 persen ke atas.

Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor non migas Jawa Tengah pada tahun 2021. Kontribusi ekspor Jawa Tengah ke negara-negara tersebut sebesar 56,84 persen terhadap total nilai ekspor Jawa Tengah pada tahun 2021. Untuk diketahui jumlah ekspor nonmigas Jawa Tengah ke beberapa negara mengalami pertumbuhan pesat adalah Amerika Serikat yang tumbuh sebesar 56,99 persen, diikuti ekspor ke negara India dengan pertumbuhan 54,30 persen.

Ditinjau dari komoditas migas dan non migas, ekspor komoditas non migas memberi peranan sebesar 95,90 persen terhadap total ekspor Jawa Tengah pada tahun 2021. Sementara ekspor komoditas migas berperan 4,10 persen terhadap total ekspor Jawa Tengah.

Komoditas ekspor luar negeri selain dalam bentuk barang seperti diuraikan di atas juga dalam bentuk jasa. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekspor barang tumbuh sebesar 29,86 persen sedangkan ekspor jasa masih berkontraksi sebesar -59,35 persen. Salah satu indikator berkontraksinya ekspor jasa adalah menurunnya jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Tengah. Pada tahun 2019 jumlah wisatawan sebanyak 27.024 orang dan tahun 2020 menjadi 5.385 orang, sedangkan tahun 2021 hanya 9 orang. Penurunan jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021 salah satunya dipicu oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Karena virus ini mematikan, beberapa negara melarang penduduknya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini yang menyebabkan salah satu pertumbuhan ekspor jasa berkontraksi.

**Tabel 4.9. Perkembangan dan Struktur Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
2017 - 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Luar Negeri					
a. ADHB (Miliar Rp)	106 463,04	123 868,88	127 703,21	118 335,36	158 820,64
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	75 670,85	84 592,90	88 909,10	81 881,14	105 743,25
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	8,51	9,08	9,77	9,38	8,77
Struktur Ekspor Luar Negeri					
a. Barang (Miliar Rp)	104 606,26	121.932,19	125.618,87	117.186,92	158 338,23
(%)	(98,26)	(98,44)	(96,88)	(97,40)	(99,70)
b. Jasa (Miliar Rp)	1 856,78	1 936,69	2 084,34	1 148,44	482 415,17
(%)	(1,74)	(1,56)	(1,63)	(0,97)	(0,30)
Total Ekspor (Miliar Rp)	106 463,04	123 868,88	127 703,21	118 335,36	158 820,64
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan (%)					
a. Barang (%)	13,53	11,96	5,08	-7,39	29,86
b. Jasa (%)	14,69	0,44	6,73	-45,45	-59,35
Total ekspor	13,54	11,79	5,10	-7,90	29,14

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Komoditas ekspor paling banyak berasal dari industri pengolahan. Sektor industri pengolahan memiliki peranan sebesar 94,22 persen, dengan perkembangannya tumbuh sebesar 34,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Lihat Lampiran 15). Perkembangan ekspor menjadi cerminan bagaimana pasar luar negeri merespon produk-produk Jawa Tengah.

4.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa Nilai impor luar negeri Jawa Tengah adh Berlaku pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 160,85 triliun rupiah menjadi 235,22 triliun rupiah pada tahun 2018. Nilai impor ini tertinggi sepanjang tahun 2017-2021. Kemudian terjadi penurunan impor selama dua tahun berturut dari 2019 sebesar 203,95 triliun rupiah dan turun menjadi 157,16 triliun tahun 2020. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19. Namun, kembali meningkat setelah terjadi pemulihan ekonomi tahun 2021 yang mencatatkan nilai impor luar negeri Jawa Tengah sebesar 204,71 triliun rupiah.

Tabel 4.10. Perkembangan dan Struktur Impor Barang dan Jasa Luar Negeri 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	160 854,81	235 222,13	203 947,07	157 157,39	204 712,54
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	104 677,13	142 739,90	133 171,99	109 668,70	143 981,27
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	13,72	18,55	14,99	11,66	14,41
Struktur Impor (% ADHB)					
a. Barang (Miliar Rp)	155 618,96	228 544,93	197 585,36	153 066,39	200 515,85
(%)	(96,74)	(97,16)	(96,88)	(97,40)	(97,95)
b. Jasa (Miliar Rp)	5 235,85	6 677,21	6 361,71	4 090,99	4 196,69
(%)	(3,26)	(2,84)	(3,12)	(2,60)	(2,05)
Total Impor (Miliar Rp)	160 854,81	235 222,13	203 947,07	157 157,39	204 712,54
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan (%)					
a. Barang (%)	9,66	36,95	-6,82	-17,09	-31,99
b. Jasa (%)	7,31	19,39	-2,84	-35,33	-2,889
Total impor	9,58	36,36	-6,70	-17,65	-31,29

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Produk migas dari luar negeri berupa minyak dan minyak mentah memberi kontribusi sebesar 37,69 persen dari total impor barang ke luar negeri Jawa Tengah. Untuk komoditas impor non migas utama adalah mesin-mesin mekanik yang digunakan sebagai

barang modal, dimana proporsinya sebesar 11,81 persen dari total impor pada tahun 2021. Perkembangan impor mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya seperti mesin, plastik, mesin dan perlengkapan elektrik, kapas dan kain rajutan. Negara pemasok barang impor terbesar ke Jawa Tengah selama tahun 2021 adalah Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang. Kontribusi dari ketiga negara asal impor barang tersebut mampu menyumbang sebesar 58,42 persen terhadap total impor Jawa Tengah pada tahun 2021.

Jika dirinci menurut golongan penggunaan barang ekonomi, nilai impor Jawa Tengah selama tahun 2021 didominasi oleh bahan baku/penolong. Jika dilihat secara akumulasi, impor bahan baku dan penolong pada tahun 2021 sebesar 86,78 persen dari total impor Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan sebagian besar industri di Jawa Tengah masih mengandalkan bahan baku dan penolong dari impor untuk mendukung proses produksinya. Kondisi ini selain memboroskan devisa juga sangat rentan bagi industri lokal ketika ada gejolak di negara-negara pengimpor komoditas bahan baku dan penolong tersebut.

4.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Konsep antar daerah disini adalah antar provinsi yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Dalam penghitungannya masih dibantu dengan metode *cross-hauling*.

Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor-impor dengan metode *cross hauling* diawali dengan metode commodity balance. Metode commodity balance adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input- Output bayangan. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan demand dan *supply* suatu perekonomian.

Tabel 4.11. Net Ekspor Antar Daerah 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor Antar Daerah					
ADHB (Miliar Rp)	30 785,14	70 646,26	35 889,36	19 006,17	30 230,17
a. Ekspor	358 810,22	414 435,88	449 520,28	378 759,71	412 712,52
b. Impor	328 025,08	343 789,62	413 630,92	359 753,54	382 482,35
ADHK 2010 (Miliar Rp)	50 074,62	78 616,39	73 035,59	55 985,75	72 675,50
a. Ekspor	253 302,03	284 763,17	302 506,58	255 345,11	285 332,99
b. Impor	203 227,41	206 146,79	229 470,99	199 359,35	212 657,49
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,62	5,57	2,64	1,41	2,13

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam *series* PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang, yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian juga sebaliknya.

Kontribusi net ekspor antar daerah dalam kurun waktu 2017 - 2021 selalu bernilai positif, baik adh berlaku maupun adh konstan. Hal ini menunjukkan nilai ekspor antar daerah lebih besar dari nilai impornya, atau dengan perkataan lain perdagangan antar daerah Provinsi Jawa Tengah dengan provinsi-provinsi lain selalu mengalami surplus (Tabel 4.11). Peningkatan net ekspor antar daerah juga mempengaruhi peningkatan

pertumbuhan ekonomi secara total. Sehingga, ekspor antar daerah harus ditingkatkan untuk memacu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah.

Output bayangan. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (balancing item) dalam keseimbangan demand dan *supply* suatu perekonomian.

<https://jateng.bps.go.id>

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021** (PERSEN)



60,14

PENGELUARAN
KONSUMSI
RUMAH TANGGA

1,18

PENGELUARAN
KONSUMSI
LNPRT

7,18

PENGELUARAN
KONSUMSI
PEMERINTAH

31,76

PEMBENTUKAN
MODAL TETAP
BRUTO

0,84

PERUBAHAN
INVENTORI

11,18

EKSPOR LUAR
NEGERI

14,41

IMPOR LUAR
NEGERI

2,13

NET EKSPOR
ANTAR DAERAH



1. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, ekonomi global tahun 2021 mulai bangkit. Aktivitas ekonomi mulai menggeliat dan tercatat tumbuh sebesar 5,5 persen.
2. Pemulihan global pada tahun 2021 sebagian besar didorong oleh belanja konsumen yang meningkat dan penyerapan investasi. Rebound pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar mendapatkan pengaruh positif dari peluncuran program vaksinasi Covid-19. Keberhasilan program vaksin mempengaruhi sentimen bisnis dan mendorong pengeluaran konsumsi.
3. Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh 3,7 persen. PDB Indonesia berhasil melampaui level prapandemi. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 ditopang oleh pertumbuhan positif seluruh komponen utama pengeluaran. Keberhasilan pengendalian pandemi pasca penyebaran varian Delta tahun 2021 mampu mendorong keyakinan masyarakat untuk beraktivitas dan usaha untuk berekspansi.
4. Ekonomi Jawa Tengah mulai tumbuh 3,32 persen setelah dihantam pandemi Covid-19. Semua komponen PDRB pengeluaran tahun 2021 tumbuh positif.
5. PDRB Jawa Tengah tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 1.420,80 triliun rupiah yang sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 60,14 persennya.

Laju indeks harga implisit
PDRB MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021** (PERSEN)



2,70

2018

1,74

2020*

2017

2,47

2019

1,85

2021**

2,01



Lampiran

Lampiran 1. Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara di Dunia 2017 - 2021 (Miliar Rp)

Negara	2017	2018	2019	2020	2021e
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Amerika Serikat	2,2	3,0	2,3	-3,4	5,6
Eropa	2,4	1,9	1,6	-6,4	5,2
Jepang	1,7	0,6	-0,2	-4,5	1,7
China	6,9	6,6	6,0	2,2	8,0
Federasi Rusia	1,5	2,5	2,0	-3,0	4,3
Brazil	1,0	1,8	1,2	-3,9	4,9
Mexico	2,0	2,2	-0,2	-8,2	5,7
Arab Saudi	-0,9	2,4	0,3	-4,1	2,4
India	6,7	6,1	4,0	-7,3	8,3
Nigeria	0,8	1,9	2,2	-1,8	2,4
Afrika Selatan	1,3	0,8	0,1	-6,4	4,6
Dunia	3,7	3,0	2,6	-3,4	5,5

**Lampiran 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Komponen Pengeluaran 2017 - 2021 (Miliar Rp)**

Komponen Pengeluaran (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7 623 056,11	8 274 214,43	8 965 837,39	8 899 917,58	9 236 010,03
a.Makanan, Minuman selain Restoran	2 986 882,01	3 255 945,89	3 529 891,68	3 669 993,47	3 803 177,52
b.Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	273 621,29	296 092,19	321 705,24	316 446,60	319 910,75
c.Perumahan dan d.Perengkapan e.Rumah Tangga	980 387,89	1 060 517,02	1 144 776,68	1 186 899,96	1 223 144,65
f. Kesehatan dan g.Pendidikan	515 134,08	558 969,26	6165 04,64	652 831,63	677 164,25
h.Transportasi dan i. Komunikasi	1 748 905,24	1 894 012,58	2 042 268,50	1 796 642,85	1 861 938,03
j. Restoran dan Hotel	755 577,03	826 225,85	903 979,63	853 216,32	909 175,63
k.Lainnya	362 548,57	382 451,64	406 711,02	423 886,75	441 499,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	160 594,43	180 893,25	206 094,49	201 361,88	207 766,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 239 469,72	1 338 638,58	1 394 615,06	1 474 067,68	1 551 706,55
a.Konsumsi Kolektif	761 297,46	821 700,18	868 092,34	885 666,55	891 773,34
b.Konsumsi Individu	478 172,26	516 938,40	526 522,72	588 401,13	659 933,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 370 574,77	4 791 211,30	5 121 371,35	4897 049,69	5 227 853,94
a.Bangunan	3 283 435,90	3 566 926,73	3 841 446,57	3 719 738,79	3 933 012,08
b.Mesin dan Perlengkapan	405 943,79	499 902,52	543 300,59	477 468,14	535 062,48
c.Kendaraan	233 934,30	256 440,49	253 821,43	223 484,72	258 006,92
d.Peralatan Lainnya	77 498,95	86 978,22	84 941,32	75 728,97	84 536,96
e.CBR	254 661,99	264 525,33	278 745,22	282 565,06	292 469,93
f. Produk Kekayaan Intelektual	115 099,84	116 438,01	119 116,22	118 064,01	124 765,59
5. Perubahan Inventori	210 636,31	338 633,58	226 922,80	97 857,67	111 142,96
6. Ekspor Barang dan Jasa	2 742 060,50	3 116 546,31	2 943 532,86	2 666 365,05	3 659 039,79
a.Barang	2 386 700,49	2 708 682,46	2 525 395,98	2 453 882,17	3 464 808,27
a.1. Barang Non Migas	2 177 008,70	2 465 166,50	2 344 034,79	2 325 698,50	3 274 470,66
a.2. Barang Migas	209 691,79	243 515,95	181 361,19	128 183,67	190 337,61
b.Jasa	355 360,02	407 863,85	418 136,88	212 482,88	194 231,52
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 606 282,95	3 275 145,30	3 013 944,16	2 424 413,17	3 201 022,91
a.Barang	2 154 432,48	2 753 480,50	2 479 523,51	2 071 090,61	2 791 731,58
a.1. Barang Non Migas	1 820 684,03	2 317 267,91	2 162 656,21	1 867 270,09	2 429 969,42
a.2. Barang Migas	333 748,45	436 212,59	316 867,29	203 820,52	361 762,16
b.Jasa	451 850,47	521 664,80	534 420,66	353 322,56	409 291,33
PDB	13 589 825,70	14 838 756,00	15 832 657,20	15 438 017,50	16 970 789,20

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 3. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Komponen Pengeluaran 2017 – 2021 (Miliar Rp)**

Komponen Pengeluaran (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5 379 628,64	5 651 456,27	5 936 399,47	5 780 223,44	5 896 697,43
a. Makanan, Minuman selain Restoran	1 969 261,34	2 072 120,58	2 179 119,14	2 190 250,95	2 221 746,50
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	212 345,95	221 470,07	230 920,53	221 190,80	221 059,01
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	727 237,10	760 931,91	796 376,16	814 540,29	832 381,76
d. Kesehatan dan Pendidikan	373 129,39	391 786,66	417 643,65	430 533,98	437 838,50
e. Transportasi dan Komunikasi	1 334 374,09	1 407 373,01	1 474 685,11	1 333 608,96	1 368 561,28
f. Restoran dan Hotel	502 070,85	530 343,78	561 967,47	516 212,06	536 199,62
g. Lainnya	261 209,92	267 430,25	275 687,39	273 886,40	278 910,75
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112 664,35	122 969,84	136 027,41	130 248,66	132 316,75
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	790 756,40	828 876,59	855 962,99	872 774,06	909 173,25
a. Konsumsi Kolektif	485 455,62	508 010,61	531 495,22	525 576,95	521 844,82
b. Konsumsi Individu	305 300,78	320 865,98	324 467,77	347 197,11	387 328,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 228 763,01	3 444 310,25	3 597 664,13	3 419 181,61	3 549 218,80
a. Bangunan	2 419 271,82	2 550 271,59	2 687 303,09	2 585 622,97	2 645 502,22
b. Mesin dan Perlengkapan	308 540,42	369 427,38	387 001,88	342 342,23	382 273,44
c. Kendaraan	186 458,53	201 829,66	193 520,20	168 223,66	187 893,93
d. Peralatan Lainnya	55 375,99	59 995,51	58 113,51	51 979,25	56 790,14
e. CBR	175 833,93	180 624,14	189 751,10	195 075,90	197 336,28
f. Produk Kekayaan Intelektual	83 282,32	82 161,98	81 974,36	75 937,60	79 422,79
5. Perubahan Inventori	126 883,56	197 369,64	129 953,84	51 334,13	62 709,09
6. Ekspor Barang dan Jasa	2 146 564,52	2 286 394,89	2 275 488,26	2 090 273,36	2 592 682,34
a. Barang	1 915 737,26	2 038 478,44	2 026 847,84	1 963 139,40	2 481 821,82
a.1. Barang Non Migas	1 664 739,51	1 805 236,00	1 829 521,44	1 775 129,85	2 262 981,67
a.2. Barang Migas	250 997,75	233 242,43	197 326,40	188 009,55	218 840,15
b. Jasa	230 827,26	247 916,46	248 640,42	127 133,95	110 860,51
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1 964 819,17	2 203 269,94	2 046 244,20	1 704 165,01	2 101 351,67
a. Barang	1 694 413,09	1 915 577,84	1 756 455,93	1 519 895,45	1 892 980,32
a.1. Barang Non Migas	1 355 498,75	1 584 931,21	1 485 562,23	1 294 207,82	1 623 580,14
a.2. Barang Migas	338 914,34	330 646,63	270 893,69	225 687,62	269 400,18
b. Jasa	270 406,08	287 692,10	289 788,27	184 269,57	208 371,35
PDB	9 912 928,10	10 425 851,90	10 949 155,40	10 723 054,80	11 118 868,50

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Adh Berlaku
Menurut Komponen Pengeluaran 2017 – 2021 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	56,66	55,76	56,63	57,65	54,42
a. Makanan, Minuman selain Restoran	22,25	21,94	22,30	23,77	22,41
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,07	2,00	2,03	2,05	1,89
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	7,28	7,15	7,23	7,69	7,21
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,82	3,77	3,89	4,23	3,99
e. Transportasi dan Komunikasi	12,88	12,76	12,90	11,64	10,97
f. Restoran dan Hotel	5,61	5,57	5,71	5,53	5,36
g. Lainnya	2,75	2,58	2,57	2,75	2,60
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,17	1,22	1,30	1,30	1,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,53	9,02	8,81	9,55	9,14
a. Konsumsi Kolektif	5,9	5,54	5,48	5,74	5,25
b. Konsumsi Individu	3,63	3,48	3,33	3,81	3,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,58	32,29	32,35	31,72	30,81
a. Bangunan	24,49	24,04	24,26	24,09	23,18
b. Mesin dan Perlengkapan	2,94	3,37	3,43	3,09	3,15
c. Kendaraan	1,68	1,73	1,60	1,45	1,52
d. Peralatan Lainnya	0,56	0,59	0,54	0,49	0,50
e. CBR	1,99	1,78	1,76	1,83	1,72
f. Produk Kekayaan Intelektual	0,92	0,78	0,75	0,76	0,74
5. Perubahan Inventori	1,28	2,28	1,43	0,63	0,65
6. Ekspor Barang dan Jasa	19,09	21,00	18,59	17,27	21,56
a. Barang	16,45	18,25	15,95	15,90	20,42
a.1. Barang Non Migas	15,05	16,61	14,81	15,06	19,29
a.2. Barang Migas	1,4	1,64	1,15	0,83	1,12
b. Jasa	2,64	2,75	2,64	1,38	1,14
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	18,33	22,07	19,04	15,70	18,86
a. Barang	14,93	18,56	15,66	13,42	16,45
a.1. Barang Non Migas	12,87	15,62	13,66	12,10	14,32
a.2. Barang Migas	2,06	2,94	2,00	1,32	2,13
b. Jasa	3,40	3,52	3,38	2,29	2,41
PDB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* angka sementara

** angka sangat sementara

Lampiran 5. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHK 2010
Menurut Komponen Pengeluaran 2017 – 2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4,94	5,05	5,04	-2,63	2,02
a. Makanan, Minuman selain Restoran	5,24	5,22	5,16	0,51	1,44
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	3,37	4,30	4,27	-4,21	-0,06
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4,19	4,63	4,66	2,28	2,19
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,46	5,00	6,60	3,09	1,70
e. Transportasi dan Komunikasi	5,39	5,47	4,78	-9,57	2,62
f. Restoran dan Hotel	5,40	5,63	5,96	-8,14	3,87
g. Lainnya	2,30	2,38	3,09	-0,65	1,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,93	9,15	10,62	-4,25	1,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,12	4,82	3,27	1,96	4,17
a. Konsumsi Kolektif	1,63	4,65	4,62	-1,11	-0,71
b. Konsumsi Individu	2,92	5,10	1,12	7,01	11,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,15	6,68	4,45	-4,96	3,80
a. Bangunan	6,24	5,41	5,37	-3,78	2,32
b. Mesin dan Perlengkapan	9,52	19,73	4,76	-11,54	11,66
c. Kendaraan	8,86	8,24	-4,12	-13,07	11,69
d. Peralatan Lainnya	9,25	8,34	-3,14	-10,56	9,26
e. CBR	1,00	2,72	5,05	2,81	1,16
f. Produk Kekayaan Intelektual	(3,83)	-1,35	-0,23	-7,36	4,59
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	8,90	6,51	-0,48	-8,14	24,04
a. Barang	9,29	6,41	-0,57	-3,14	26,42
a.1. Barang Non Migas	10,50	8,44	1,35	-2,97	27,48
a.2. Barang Migas	1,92	-7,07	-15,40	-4,72	16,40
b. Jasa	5,73	7,40	0,29	-48,87	-12,80
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8,07	12,14	-7,13	-16,72	23,31
a. Barang	8,73	13,05	-8,31	-13,47	24,55
a.1. Barang Non Migas	9,54	16,93	-6,27	-12,88	25,45
a.2. Barang Migas	5,62	-2,44	-18,07	-16,69	19,37
b. Jasa	4,08	6,39	0,73	-36,41	13,08
PDB	5,03	5,07	5,02	-2,07	3,69

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 6. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Pengeluaran 2017 - 2021 (Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	711 586 510,45	764 808 380,14	821 948 116,9	822 472 692,81	854 472 692,8
a. Makanan, Minuman dan Rokok	274 574 689,03	295 420 925,87	315 040 286,39	325 686 653,59	346 663 200,7
b. Pakaian & Alas Kaki	28 281 596,66	30 181 038,88	32 371 175,66	33 839 355,52	34 399 735,64
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	91 885 513,69	97 900 018,93	104 069 131,88	105 607 593,80	107 967 315,6
d. Kesehatan dan Pendidikan	56 462 907,05	61 904 921,44	66 902 113,62	67 872 762,41	70 125 378,85
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	186 254 261,08	197 885 828,71	214 614 672,93	203 968 623,20	206 555 293,5
f. Hotel dan Restoran	59 685 850,1	65 937 146,61	72 508 863,55	67 644 904,19	70 772 248,01
g. Lainnya	14 441 692,84	15 578 499,70	16 441 872,86	17 475 609,47	17 989 520,48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13 168 406,66	14 491 861,85	16 443 217,00	16 064 605,33	16 784 696,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	94 261 559,47	98 717 169,57	103 209 517,34	98 965 673,08	101 975 112,11
a. Konsumsi Kolektif	47 239 879,42	49 458 380,83	52 386 519,49	49 920 988,01	50 421 310,14
b. Konsumsi Individu	47 021 680,04	49 258 788,74	50 822 997,85	49 044 685,07	51 553 801,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	366 766 466,19	413 749 152,51	448 351 588,67	417 815 396,91	451 292 659,12
a. Bangunan	313 778 521,65	348 207 109,97	375 502 756,28	355 684 854,45	387 156 374,42
b. Non-Bangunan	52 987 944,54	65 542 042,54	72 848 832,39	62 130 542,46	64 136 284,70
5. Perubahan Inventori	10 618 211,83	17 201 588,33	11 362 198,39	12 797 370,70	11 936 472,64
6. Ekspor Luar Negeri	106 463 040,81	123 868 883,79	127 703 207,21	118 335 356,82	158 820 642,64
a. Barang	104 606 263,31	121 932 193,55	125 618 871,89	117 186 916,63	158 338 227,47
b. Jasa	1 856 777,50	1 936 690,24	2 084 335,32	1 148 440,19	482 415,17
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	160 854 809,28	235 222 134,05	203 947 073,27	157 157 385,33	204 712 538,00
a. Barang	155 618 957,45	228 544 928,78	197 585 360,47	153 066 391,01	200 515 849,25
b. Jasa	5 235 851,83	6 677 205,27	6 361 712,80	4 090 994,32	4 196 688,75
8. Net Ekspor Antar Daerah	30 785 137,55	70 646 263,45	35 889 358,75	19 006 169,34	30 230 171,06
PDRB	1 172 794 523,68	1 268 261 165,59	1 360 960 130,98	1 347 922 689,03	1 420 799 908,38

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 7. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Pengeluaran 2017 - 2021 (Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	531 583 769,93	556 540 857,91	582 253 351,4	573 976 750	584 447 297,8
a. Makanan, Minuman dan Rokok	188 107 087,72	194 498 117,15	201 493 305,8	204 123 136,7	207 883 147,6
b. Pakaian & Alas Kaki	25 013 850,38	26 313 431,66	27 674 354,11	27 958 369,79	28 023 330,59
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	67 708 235,52	70 863 454,47	73 421 901,67	73 822 713,84	74 407 600,3
d. Kesehatan dan Pendidikan	43 668 199,77	46 230 002,87	48 536 150,15	50 247 804,86	50 342 919,83
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	151 155 949,07	158 657 676,81	167 135 507,3	157 288 170,5	162 903 474,3
f. Hotel dan Restoran	44 594 781,17	48 082 277,50	51 619 320,43	48 142 814,82	48 472 202,81
g. Lainnya	11 335 666,29	11 895 897,45	12 372 811,95	12 393 739,6	12 414 622,41
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8 875 109,84	9 551 013,81	10 592 513,5	10 198 075,29	10 326 056,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	59 554 139,03	61 161 379,65	63 630 742,58	61 030 715,58	61 538 711,67
a. Konsumsi Kolektif	29 463 676,76	30 208 106,22	31 802 569,52	30 313 084,20	29 847 146,40
b. Konsumsi Individu	30 090 462,27	30 953 273,43	31 828 173,06	30 717 631,38	31 691 565,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	264 716 106,23	285 045 112,84	298 877 269,25	278 024 565,13	297 092 058,08
a. Bangunan	228 471 895,65	242 834 510,39	254 199 680,02	239 391 089,13	256 931 503,94
b. Non-Bangunan	36 244 210,58	42 210 602,45	44 677 589,23	38 633 476,00	40 160 554,14
5. Perubahan Inventori	7 952 832,63	8 323 389,98	7 389 972,57	13 797 411,55	9 475 500,26
6. Ekspor Luar Negeri	75 670 847,70	84 592 901,65	88 909 097,27	81 881 136,49	105 743 245,72
a. Barang	74 544 700,11	83 461 809,91	87 701 899,63	81 222 600,12	105 475 582,10
b. Jasa	1 126 147,59	1 131 091,74	1 207 197,64	658 536,37	267 663,62
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	104 677 125,70	142 739 899,96	133 171 990,92	109 668 698,46	143 981 270,36
a. Barang	101 147 648,47	138 526 002,46	129 077 747,96	107 020 784,04	141 257 003,37
b. Jasa	3 529 477,23	4 213 897,50	4 094 242,96	2 647 914,42	2 724 266,99
8. Net Ekspor Antar Daerah	50 074 616,51	78 616 387,98	73 035 587,71	55 985 753,45	72 675 497,36
PDRB	893 750 296,17	941 091 143,86	991 516 543,31	965 225 709,06	997 317 097,26

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 8. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran 2017 - 2021 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,67	60,30	60,39	60,99	60,14
a. Makanan, Minuman dan Rokok	23,41	23,29	23,15	22,75	23,65
b. Pakaian & Alas Kaki	2,41	2,38	2,42	2,36	2,39
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,83	7,72	7,65	7,83	7,60
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,81	4,88	4,92	5,04	4,94
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15,88	15,60	15,77	15,13	14,54
f. Hotel dan Restoran	5,09	5,20	5,33	5,02	4,98
g. Lainnya	1,23	1,23	1,21	1,30	1,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,12	1,14	1,21	1,19	1,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,04	7,78	7,58	7,34	7,18
a. Konsumsi Kolektif	4,03	3,90	3,85	3,70	3,55
b. Konsumsi Individu	4,01	3,88	3,73	3,64	3,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,27	32,62	32,94	31,00	31,76
a. Bangunan	26,75	27,46	27,59	26,39	27,25
b. Non-Bangunan	4,52	5,17	5,35	4,61	4,51
5. Perubahan Inventori	0,91	1,36	0,83	0,95	0,84
6. Ekspor Luar Negeri	9,08	9,77	9,38	8,78	11,18
a. Barang	8,92	9,61	9,23	8,69	11,14
b. Jasa	0,16	0,15	0,15	0,09	0,03
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	13,72	18,55	14,99	11,66	14,41
a. Barang	13,27	18,02	14,52	11,36	14,11
b. Jasa	0,45	0,53	0,47	0,30	0,30
8. Net Ekspor Antar Daerah	2,62	5,57	2,64	1,41	2,13
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 9. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran 2017 - 2021 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	59,48	59,14	58,72	59,47	58,60
a. Makanan, Minuman dan Rokok	21,05	20,67	20,32	21,15	20,84
b. Pakaian & Alas Kaki	2,80	2,80	2,79	2,90	2,81
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,58	7,53	7,41	7,65	7,46
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,89	4,91	4,90	5,21	5,05
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	16,91	16,86	16,86	16,30	16,33
f. Hotel dan Restoran	4,99	5,11	5,21	4,99	4,86
g. Lainnya	1,27	1,26	1,25	1,28	1,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,99	1,01	1,07	1,06	1,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,66	6,50	6,42	6,32	6,17
a. Konsumsi Kolektif	3,30	3,21	3,21	3,14	2,99
b. Konsumsi Individu	3,37	3,29	3,21	3,18	3,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,62	30,29	30,14	28,80	29,79
a. Bangunan	25,56	25,80	25,64	24,80	25,76
b. Non-Bangunan	4,06	4,49	4,51	4,00	4,03
5. Perubahan Inventori	0,89	0,88	0,75	1,43	0,95
6. Ekspor Luar Negeri	8,47	8,99	8,97	8,48	10,60
a. Barang	8,34	8,87	8,85	8,41	10,58
b. Jasa	0,13	0,12	0,12	0,07	0,03
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	11,71	15,17	13,43	11,36	14,44
a. Barang	11,32	14,72	13,02	11,09	14,16
b. Jasa	0,39	0,45	0,41	0,27	0,27
8. Net Ekspor Antar Daerah	5,60	8,35	7,37	5,80	7,29
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 10. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran 2017 - 2021 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4,62	4,69	4,62	-1,42	1,82
a. Makanan, Minuman dan Rokok	3,47	3,40	3,60	1,31	1,84
b. Pakaian & Alas Kaki	5,31	5,20	5,17	1,03	0,23
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,66	4,66	3,61	0,55	0,79
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,68	5,87	4,99	3,53	0,19
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,33	4,96	5,34	-5,89	3,57
f. Hotel dan Restoran	7,92	7,82	7,36	-6,73	0,68
g. Lainnya	6,02	4,94	4,01	0,17	0,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,43	7,62	10,90	-3,72	1,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,07	2,70	4,04	-4,09	0,83
a. Konsumsi Kolektif	4,08	2,53	5,28	-4,68	-1,54
b. Konsumsi Individu	2,09	2,87	2,83	3,49	3,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,50	7,68	4,85	-6,98	6,86
a. Bangunan	7,60	6,29	4,68	-5,83	7,33
b. Non-Bangunan	6,88	16,46	5,84	-13,53	3,95
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	13,54	11,79	5,10	-7,90	29,14
a. Barang	13,53	11,96	5,08	-7,39	29,86
b. Jasa	14,69	0,44	6,73	-45,45	-59,35
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	9,58	36,36	-6,70	-17,65	31,29
a. Barang	9,66	36,95	-6,82	-17,09	31,99
b. Jasa	7,31	19,39	-2,84	-35,33	2,88
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	5,26	5,30	5,36	-2,65	3,32

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 11. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100)
Jawa Tengah menurut Pengeluaran 2017 - 2021**

Komponen Pengeluaran (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	133,86	137,42	141,17	143,23	146,20
a. Makanan, Minuman dan Rokok	145,97	151,89	156,35	159,55	166,76
b. Pakaian & Alas Kaki	113,06	114,70	116,97	121,03	122,75
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	135,71	138,15	141,74	143,06	145,10
d. Kesehatan dan Pendidikan	129,30	133,91	137,84	135,08	139,30
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	123,22	124,73	128,41	129,68	126,80
f. Hotel dan Restoran	133,84	137,13	140,47	140,51	146,01
g. Lainnya	127,40	130,96	132,89	141,00	144,91
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	148,37	151,73	155,23	157,53	162,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	158,28	161,40	162,20	162,16	165,71
a. Konsumsi Kolektif	160,33	163,73	164,72	164,68	168,93
b. Konsumsi Individu	156,27	159,14	159,68	159,66	162,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	138,55	145,15	150,01	150,28	151,90
a. Bangunan	137,34	143,39	147,72	148,58	150,68
b. Non-Bangunan	146,20	155,27	163,05	160,82	159,70
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	140,69	146,43	143,63	144,52	150,19
a. Barang	140,33	146,09	143,23	144,28	150,12
b. Jasa	164,88	171,22	172,66	174,39	180,23
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	153,67	164,79	153,15	143,30	142,18
a. Barang	153,85	164,98	153,07	143,02	141,95
b. Jasa	148,35	158,46	155,38	154,50	154,05
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	131,22	134,76	137,26	139,65	142,46

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 12. Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100)
Jawa Tengah menurut Pengeluaran 2017 - 2021**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2,90	2,66	2,73	1,46	2,08
a. Makanan, Minuman dan Rokok	2,36	4,06	2,94	2,05	4,52
b. Pakaian & Alas Kaki	1,70	1,45	1,98	3,47	1,42
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,17	1,80	2,60	-0,93	1,43
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,99	3,56	2,94	-2,00	3,12
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,90	1,22	2,95	0,99	-2,22
f. Hotel dan Restoran	1,26	2,46	2,43	0,03	3,91
g. Lainnya	0,51	2,79	1,47	6,11	2,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,88	2,26	2,31	1,48	3,19
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,42	1,97	0,49	-0,03	2,19
a. Konsumsi Kolektif	5,40	2,12	0,61	-0,02	2,58
b. Konsumsi Individu	3,44	1,84	0,34	-0,01	1,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,16	4,76	3,35	0,18	1,08
a. Bangunan	2,08	4,41	3,02	0,58	1,42
b. Non-Bangunan	2,62	6,21	5,01	-1,37	-0,70
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	1,30	4,08	-1,91	0,62	3,93
a. Barang	1,27	4,11	-1,96	0,73	4,05
b. Jasa	2,49	3,85	0,84	1,00	3,35
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	9,36	7,24	-7,07	-6,43	-0,78
a. Barang	9,52	7,23	-7,22	-6,57	-0,75
b. Jasa	4,78	6,82	-1,94	-0,57	-0,29
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	2,47	2,70	1,85	1,74	2,01

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 13 Andil Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah
Menurut Pengeluaran 2017 - 2021 (Persen)**

Komponen Pengeluaran (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2,77	2,79	2,73	-0,83	1,08
a. Makanan, Minuman dan Rokok	0,74	0,72	0,74	0,27	0,39
b. Pakaian & Alas Kaki	0,15	0,15	0,14	0,03	0,01
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,28	0,35	0,27	0,04	0,06
d. Kesehatan dan Pendidikan	0,23	0,29	0,25	0,17	0,01
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	0,90	0,84	0,90	-0,99	0,58
f. Hotel dan Restoran	0,39	0,39	0,38	-0,35	0,03
g. Lainnya	0,08	0,06	0,05	0,00	0,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,04	0,08	0,11	-0,04	0,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,21	0,18	0,26	-0,26	0,05
a. Konsumsi Kolektif	0,14	0,08	0,17	-0,15	-0,05
b. Konsumsi Individu	0,07	0,10	0,09	-0,11	0,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,18	2,27	1,47	-2,10	1,98
a. Bangunan	1,90	1,61	1,21	-1,49	1,82
b. Non-Bangunan	0,27	0,67	0,26	-0,61	0,16
5. Ekspor Luar Negeri	1,06	1,00	0,46	-0,71	2,47
a. Barang	1,05	1,00	0,45	-0,65	2,51
b. Jasa	0,02	0,00	0,01	-0,06	-0,04
6. Dikurangi Impor Luar Negeri	1,08	4,26	(1,02)	-2,37	3,55
a. Barang	1,05	4,18	(1,00)	-2,22	3,55
b. Jasa	0,03	0,08	(0,01)	-0,15	0,01
7. Lainnya	0,08	3,23	(0,69)	-1,07	1,28
PDRB	5,26	5,30	5,36	(2,65)	3,32

* angka sementara

** angka sangat sementara

Lampiran 14 Nilai Ekspor Nonmigas Jawa Tengah Menurut Golongan Barang (juta US\$),
Perubahan (persen) dan Peranan (persen) 2020 - 2021

No	Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai		Perubahan 2021	Peran thd total ekspor nonmigas 2021
		2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	62 Pakaian Jadi Bukan Rajutan	1 750,95	2 028,83	15,87	19,78
2	61 Barang-barang Rajutan	876,22	1 218,78	39,10	11,88
3	44 Kayu, Barang dari Kayu	863,03	1 169,32	35,49	11,40
4	94 Perabot, Penerangan Rumah	659,62	922,07	39,79	8,99
5	64 Alas Kaki	534,59	871,28	62,98	8,49
6	55 Serat Stafel Buatan	336,18	446,83	32,91	4,36
7	42 Barang-barang dari Kulit	307,21	507,04	65,05	4,94
8	85 Mesin / Peralatan Listik	296,33	380,73	28,48	3,71
9	15 Lemak & Minyak Hewan/Nabati	201,39	260,31	29,26	2,54
10	67 Bulu Unggas	174,70	246,91	41,33	2,41
Total 10 Golongan Barang		6 000,22	8 052,10	34,20	78,50
Lainnya		1 704,02	2 205,25	29,41	21,50
Total Ekspor Nonmigas		7 704,24	10 257,35	33,14	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Bulan Desember 2021

Lampiran 15 Nilai Ekspor Migas Jawa Tengah (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen)
2020 - 2021

No	Uraian	Nilai		Perubahan 2021	Peran thd total ekspor 2021
		2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hasil Minyak	384,06	438,96	14,29	4,10
2	Gas	-	-	-	0,00
3	Gas Alam	-	-	-	0,00
4	Minyak Mentah	-	-	-	0,00
Total Ekspor Migas		384,06	438,96	14,29	4,10
Total Ekspor		8 088,30	10 696,31	32,24	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Bulan Desember 2021

Lampiran 16 Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Sektor (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen) 2020 - 2021

Uraian	Nilai		Perubahan	Peran thd total ekspor
	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total Ekspor	8 088,30	10 696,31	32,24	100,00
Migas	384,06	438,96	14,29	4,10
Nonmigas	7 704,24	10 257,35	33,14	95,90
- Pertanian	203,57	178,70	-12,22	1,67
- Industri pengolahan	7 499,55	10 077,51	34,37	94,22
- Pertambangan dan Lainnya	1,12	1,14	1,42	0,01

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Bulan Desember 2021

**Lampiran 17 Nilai Impor Nonmigas Jawa Tengah Menurut Golongan Barang (juta US\$),
Perubahan (persen) dan Peranan (persen) 2020 - 2021**

No	Golongan Barang (HS 2 Digit)	2020	2021	Perubahan	Peran thd Total Impor Nonmigas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	84 Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	1 125,81	867,09	-22,98	11,81
2	85 Mesin / Peralatan Listik	659,72	615,62	-6,69	8,39
3	39 Plastik dan Barang dari Plastik	443,74	624,66	40,77	8,51
4	52 Kapas	378,36	472,45	24,87	6,44
5	60 Kain Rajutan	327,08	367,32	12,30	5,00
6	12 Biji-bijian berminyak	275,17	317,54	15,40	4,32
7	10 Serelia	229,96	303,30	31,89	4,13
8	87 Kendaraan dan bagian	222,45	232,77	4,64	3,17
9	54 Filamen Buatan	211,40	225,82	6,82	3,08
10	17 Kembang Gula	204,31	230,90	13,01	3,14
Total 10 Golongan Barang		4 078,00	4 257,47	4,40	57,99
Barang Lainnya		2 487,04	3 083,80	24,00	42,01
Total Impor Nonmigas		6 565,04	7 341,27	11,82	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Bulan Desember 2021

Lampiran 18 Nilai Impor Migas Jawa Tengah (juta US\$), Perubahan (persen) dan Peranan (persen),
2020 - 2021

No	Uraian	Nilai		Perubahan 2021	Peran thd total impor 2021
		2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hasil Minyak	156,04	627,33	302,03	5,32
2	Gas	-	-	-	-
3	Gas Alam	-	-	-	-
4	Minyak Mentah	1 998,72	3 813,19	90,78	32,37
Total Impor Migas		2 154,76	4 440,52	106,08	37,69

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Bulan Desember 2021

Lampiran 19 Persentase Impor Jawa Tengah Menurut Golongan Penggunaan Barang
2020 - 2021

Golongan Penggunaan Barang	Persentase	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Total Impor	100,00	100,00
Barang Konsumsi	8,01	6,83
Bahan Baku/ Penolong	81,31	86,78
Barang Modal	10,68	6,39

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Ekspor dan Impor
Jawa Tengah Bulan Desember 2021

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pendapatan Nasional Indonesia 2017-2021*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. “[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) 2016-2020”, <https://www.bps.go.id/indicator/169/1955/1/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran.html> 7 Februari 2022.
- Badan Pusat Statistik. 2022. “[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) 2017-2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/169/1956/1/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran.html.html>, 7 Februari 2021.
- Badan Pusat Statistik. 2022. “[Seri 2010] Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen) 2017-2021”, <https://www.bps.go.id/dynamic-table/2015/08/06/834/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran-miliar-rupiah-2017-2021.html>, 7 Februari 2021.
- Badan Pusat Statistik. 2022. “[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen) 2017-2021”, <https://www.bps.go.id/dynamic-table/2015/08/06/834/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran-miliar-rupiah-2016-2020.html>, 7 Februari 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. *Perkembangan Ekspor dan Impor Jawa Tengah Bulan Desember 2021*. Semarang : Berita Resmi Statistik, No. 12/02/33.Th.XVI (2 Februari 2021).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. *Perkembangan Statistik Pariwisata Jawa Tengah Bulan Desember 2021*. Semarang : Berita Resmi Statistik, No. 10/02/33.Th.XVI (2 Februari 2021).
- Core Indonesia, 2022. “Core Economic Outlook 2022 Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi”, November 2021

Core Indonesia (Center Of Reform On Economics) 2022, “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi”, Desember 2021

World Bank Group. 2021. “Global Economic Prospects, A World Bank Group Flagship Report”, January 2021

<https://jateng.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412804, 841805, Fax 8311195

Homepage : <http://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id

ISSN : 2655-075x

